

**DELIK PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL-SIMBOL AGAMA
DALAM HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Penyusunan Skripsi
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**MERLIA ANGGRAINI
NPM : 1221020025**

Jurusan : Siyasah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H /2017 M**

**DELIK PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL-SIMBOL AGAMA
DALAM HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Penyusunan Skripsi
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**MERLIA ANGGRAINI
NPM : 1221020025**

**Pembimbing I : Dr. Erina Pane, SH. M. Hum.
Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, MA.**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

**FAKULTAS SYARIAHDAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2017 M**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarampe Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : DELIK PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL-
SIMBOL AGAMA DALAM HUKUM POSTIF
DAN HUKUM ISLAM

Nama : Merlia Anggraini
NPM : 1221020025
Jurusan : Siyasa
Fakultas : Syariah dan Hukum

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Erina Pane, SH. M. Hum.

NIP. 197005022000032001

Pembimbing II,

Drs. Henry Iwansyah, MA.

NIP.1958120719870310003

Ketua Jurusan

Drs. Susiadi AS. M. Sos.I

NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “DELIK PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL-SIMBOL AGAMA DALAM HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM”, ditulis oleh Merlia Anggraini, NPM. 1221020025, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum pada hari kamis tanggal 30 November 2017

TIM / DEWAN PENGUJI :

Ketua : Frenki, M. Si.

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Drs. Maimun, SH. MA.

Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, SH. M.Hum.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Adhmsyah S. Ag. M. Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ۖ الشَّيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنُّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا
يَفْتَرُونَ ۝ ١١٢

Artinya : “Dan demikianlah kami jadikan tip-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan jenis jin, sebahagian mereka membisikan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan”. (QS. Al-An’am (6) :112)¹



¹Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005), h. 381

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua ku Bapak Sardi (alm) dan Ibu Tin Iriyanti, yang dengan do'a dan kasih sayang nya yang selalu mengiringi di setiap langkah hidup ku, yang selalu memberi dukungan moril maupun materil sehingga aku dapat menyelesaikan perkuliahanku.
2. Buat Kakakku Santy dan Aris Munandar yang selalu memberikan senyuman sehingga menjadi kekuatan bagiku untuk menyelesaikan studi.
3. Partner Imam Arief Wijaksono, Amd yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat selesai dengan baik.
4. Untuk Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan ku untuk belajar.



RIWAYAT HIDUP

Merlia Anggraini adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, yang dilahirkan dari pasangan Ayah bernama Sardi (alm) dan Ibu bernama Tin Iriyanti. Penulis dilahirkan di Teluk Betung, 2 Desember 1992.

Pendidikan pertama dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung selesai tahun 2005, kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung selesai pada tahun 2008 dan dilanjutkan di sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) Utama 2 Bandar Lampung selesai 2011.

Kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah pada Syariah UIN Raden Intan Lampung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.WB

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Delik Penghinaan terhadap Simbol-simbol Agama dalam Hukum Postif dan Hukum Islam)”.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 di jurusan Siyasah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan perasaan terdalam kepada semua orang yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S. Ag. M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

3. Drs. Susiadi, M. Sos. I selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Erina Pane, SH. M. Hum. selaku pembimbing I dan Drs. Henry Iwansyah, MA. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Sahabat-sahabatku: Nurulina, Kinanti, S.H, Nadia Juliana, S.H, Siti Maryam, S.H, Nuriswati, S.H, M.Galib Iqbal, S.H, Sultan Tirta MH, S.H, Sulistyo AR, S.H, Wahyu S, S.H, Arif M, S.H, Ruslan AG, S.H, Budi S, S.H, Faiz, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga kita selalu menjadi sahabat dan saudara untuk selamanya, amin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis tetap berharap semoga kripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di bangku kuliah, semoga skripsi mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 30 Desember 2017
Penulis

Merlia Anggraini





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11

BAB II DELIK PENGHINAAN

A. Pengertian Delik	16
B. Jenis-jenis Delik.....	20
C. Unsur-unsur Delik.....	25
D. Penggolongan Delik Penghinaan Umum	30
E. Penggolongan Delik Penghinaan Khusus	43

BAB III DELIK PENGHINAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

<i>A. Delik Penghinaan menurut Hukum Positif</i>	
1. <i>Pengertian Delik Penghinaan</i>	61
2. <i>Unsur-unsur Delik Penghinaan</i>	62
3. <i>Sanksi Hukum terhadap Pelaku Penginaan Simbol-simbol</i>	
<i>Agama</i>	65
 <i>B. Delik Penghinaan menurut Hukum Islam</i>	
1. <i>Pengertian Delik Penghinaan</i>	73
2. <i>Jenis-jenis Riddah</i>	75
3. <i>Sanksi Hukuman untuk Jarimah Riddah</i>	78
4. <i>Unsur-unsur dalam Penghinaan terhadap Simbol Agama</i>	81

BAB IV ANALISIS

A. Tinjauan Yuridis terhadap Delik Penghinaan Simbol-simbol	
Agama dalam Pasal 156a	83
 B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Delik Penghinaan	
Simbol-simbol Agama.....	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran	101

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah "Delik Penghinaan terhadap Simbol-simbol Agama dalam Hukum Postif dan Hukum Islam". Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Delik penghinaan merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu delik dan penghinaan. Delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, bahasa Jerman disebut *delict*, bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* yang dapat diartikan sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.²

Sedangkan “penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi tujuh bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap negara, penghinaan terhadap

²P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 197

badan/kekuasaan umum, penghinaan terhadap golongan, penghinaan (menista) terhadap agama”.³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperjelas bahwa delik penghinaan adalah (1) barang siapa; (2) dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Dari elemen pokok tindak pidana penghinaan yang dilakukan seseorang itu haruslah dilakukan dengan sengaja dan dilakukan didepan umum baik dengan tulisan atau dalam bentuk lisan.

Simbol agama adalah “tanda atau ciri atau tanda yang memberitahukan segala sesuatu hal kepada seseorang tentang suatu agama yang mengandung maksud tertentu, karena symbol merupakan suatu objek, kejadian, bunyi bicara atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia”.⁴

Simbol agama yang dimaksud dalam penelitian ini tanda atau ciri yang mengandung maksud tertentu yang terdapat dalam agama tertentu, seperti simbol dari agama Islam adalah Al Quran, ka'bah, masjid, ulama/kyai, simbol agama Kristen seperti gambar salib, burung merpati, simbol agama Budha bunga dan dupa, symbol agama Hindu swastika

Hukum positif adalah “kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum di

³R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1995), h. 228.

⁴Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 287

Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum adat”.⁵

Hukum Islam adalah “hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya”.⁶

Berdasarkan penjelasan judul tersebut di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang mendalam untuk mengkaji dan mendalami tentang delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam hukum postif dan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Negara memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan untuk memeluk dan beribadah ini mengharuskan seluruh masyarakat untuk senantiasa menghormati agama dan pemeluk agama lain dan tidak melakukan penghinaan terhadap simbol agama masing-masing karena dikhawatirkan akan menimbulkan diharmonisasi antar pemeluk agama. Maka penulis akan mengkaji

⁵Dedi Ismatullah, *Hukum Tata Negara*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009), h. 119.

⁶Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jakarta, Media Sarana Press, 2007), h. 86.

tinjauan normatif antara hukum Islam dan hukum positif mengenai delik penghinaan agama.

2. Dalam penelitian ini penulis memilih judul tentang deli penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam perspektif fiqih jinayah maupun hukum positif karena ada relevansinya dengan jurusan penulis yakni Jinayah Siyasah serta tersedianya literatur yang mendukung.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.⁷

Perjalanan manusia untuk melaksanakan amanah tidaklah mulus. Berbagai rintangan, ujian, dan godaan menghadang ditengah jalan. Perjuangan manusia semakin berat karena harus berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Musuh-musuh ini seringkali menipu daya manusia dengan perkataan-perkataan yang indah. Firman Allah dalam al Qur'an yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ۚ الشَّيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٢

Artinya : “Dan demikianlah kami jadikan tip-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan jenis jin, sebahagian mereka membisikan kepada

⁷C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. 8. h.36

sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan". (QS. Al-An'am (6) :112)⁸

Agama Islam adalah agama yang membawa rahmat seluruh alam. Untuk mewujudkannya harus ada norma yang menjadi aturan, dalam agama Islam norma tersebut dikenal dengan istilah syariah, yaitu suatu tatanan aturan kehidupan yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya juga hubungan antara manusia dan tuhan. Istilah syariah ini sebenarnya dalam kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma hukum yang merupakan dari proses tasyri'. Dalam istilah para ulama fiqh tasyr i' bermakna menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia baik hubungan manusia dengan tuhan maupun dengan sesamanya.⁹

Syari'at yang dimaksud di sini adalah syariah yang mencakup ketentuan-ketentuan Allah dan rasulnya dan norma-norma hukum hasil kajian ulama mujtahid untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Inilah yang terkenal dengan *maqasid al-syariah* (tujuan perundang-undangan) dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa hukum Islam sangat menjaga dan memelihara urusan-urusan yang berkaitan dengan keyakinan (agama), hal itu terlihat dimana urusan tentang pemeliharaan agama di tempatkan pada urusan-urusan yang dharuri (adanya adalah mutlak), untuk itu setaip tindakan berkaitan dengan hal ini

⁸Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005), h. 381

⁹Muhammad Faruq Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Qolam, 1981), h. 11

sangat diperhatikan misalnya hukum murtad (penyelewengan akidah). Untuk menghadapi fenomena berkembangnya aliran-aliran kepercayaan baru dalam masyarakat, kita tidak harus menanggapi secara emosional dan reaktif dengan prasangka-prasangka yang tidak berdasar (tanpa melihat akar permasalahan) yang ada. Kita seharusnya lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah.

Kekerasan, teror, penghinaan, acaman serta pengucilan, bukanlah jalan keluar yang baik. Menghancurkan, bahkan membunuh mereka yang dianggap sesat tanpa memperbaiki kondisi kesemrawutan bangsa kita dari segala aspek, hanya akan melahirkan kesesatan baru yang mungkin jauh lebih berbahaya. Kemunculan nabi-nabi palsu kini banyak menyeret umat yang lemah iman. Mereka yang lapar dan haus akan nilai-nilai religius lebih menyukai jalan pintas ke surga. Ironisnya, kepada para nabi palsu itu mereka gantungkan sejuta harapan akan ke surga dan kedamaian. Padahal surga yang ditawarkan oleh nabi palsu itu adalah surga yang palsu pula. Bagi orang-orang yang beriman soal kenabian adalah ajaran yang sudah final.¹⁰ Muhammad adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi lagi setelah beliau. Allah SWT menegaskan dalam al Qur'an yaitu

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٤٠١

¹⁰Armansyah, *Jejak Nabi Palsu*, (Bandung: Mizan Publika, 2007), h. i

Artinya : “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Ahzab (33) : 40)¹¹

Sedangkan dalam hukum positif sebagai perwujudan aturan hukum untuk mencapai kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera meliputi perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar warga negara, misalnya bidang agama. Hal itu sesuai dengan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Negara Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹² Sebagai dasar negara yang mengakui keberadaan berbagai macam kepercayaan (agama), jaminan kebebasan beragama ditujukan agar masyarakat Indonesia dapat memilih menentukan keberagamaan mereka masing-masing tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Disebutkan pula bahwa setiap umat beragama bebas untuk menjalankan tata cara beribadah menurut agama yang dianutnya. Hal ini senada dengan azas kebebasan berkeyakinan yang dijamin Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) yaitu “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 28E ayat (1) menyebutkan “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,

¹¹Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 461

¹²Tim Sinar Grafika, *Undang-undang Dasar Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1995), h. 26

serta berhak kembali”. Sedangkan ayat (2) pasal 28E menegaskan”setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”,¹³ artinya seseorang dijamin kebebasannya untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya tetapi perdebatan tentang penghinaan atau penistaan agama senantiasa aktual, baik dalam hukum Islam maupun positif, khususnya yang diatur dalam KUHP.

Sebut saja dalam kasus-kasus akhir-akhir ini yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada bulan September 2016 dimana dalam pidatonya beliau menyatakan penghinaan terhadap symbols-simbol agama yaitu Al Quran dan ulama. Kemudian akibat dari perbuatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menjatuhkan Ahok bersalah dihukum dua tahun penjara karena telah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan terhadap symbol agama yaitu Al Quran dan Ulama sesuai dengan pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴

Delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama bukan hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Ketentuan yang lebih dikenal dengan

¹³ *Ibid.*, h. 34

¹⁴ Republika.online, *Akhir Perjalanan Kasus Ahok*, <https://news.detik.com>, diakses September 2017.

Undang-undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 ini sangat singkat isinya, karena hanya berisi 5 Pasal.

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang melarang untuk memperolok-olok bahkan menghina orang lain yaitu salam surat al Hujurat ayat 11 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ ۚ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرٌ ۚ لَّآ مَتَّعُهُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka...(QS. Al Hujurat : 11)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik ingin menuangkannya dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Delik Penghinaan terhadap Simbol-simbol Agama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”.

D. Rumusan Masalah

Masalah pada hakikatnya adalah "segala bentuk pertanyaan yang sulit dan perlu dicari jawaban atau segala hambatan, gangguan, halangan serta rintangan dan kesulitan yang perlu disingkirkan atau dihilangkan".¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap delik penghinaan simbol-simbol agama ?.

¹⁵Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta: bumi Aksara, Cet V, 2004), h. 38.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap delik penghinaan simbol-simbol agama ?.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap delik penghinaan simbol-simbol agama.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap delik penghinaan simbol-simbol agama.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pandangan hukum Islam maupun hukum positif tentang delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dan sanksi hukuman pelaku tindak penghinaan terhadap simbol agama.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami tentang penegakan hukum penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang diatur dalam KUHP khususnya pasal 156a tentang penghinaan simbol-simbol agama.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang di perlukan

untuk mencapai gelar S1 jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian. Karena metode sebagaimana yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat adalah "sebuah rumusan yang terdiri dari sejumlah langkah yang dirangkaikan dalam urutan-urutan tertentu".¹⁶

Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu “penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, majalah, kisah, dokumen dan lain”¹⁷

Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama menurut hukum positif dan hukum Islam.

¹⁶Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. Ke V, h. 7.

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), cetakan ketiga, h. 33.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni "suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi obyek dalam penelitian".¹⁸

Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguraikan apa adanya mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu "suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya".¹⁹

Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari ayat-ayat Al Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga mengatur tentang delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), cet ketujuh, h. 105.

¹⁹H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h. 115.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan yang aslinya.²⁰

Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku-buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen dan lain-lain yang berkenaan dengan judul yang dibahas yaitu delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama menurut hukum positif dan hukum Islam.

c. Data Tersier

Data tersier adalah “kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan sumber data sekunder”.²¹

Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari transkrip, internet, katalog perpustakaan, daftar bacaan dan lain-lain yang berkenaan dengan judul yang dibahas yaitu delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama menurut hukum positif dan hukum Islam.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka data tersebut diolah dan sekaligus di analisa, kemudian diolah dengan cara, antara lain²² :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dari

²⁰*Ibid.*, h 95.

²¹*Ibid.*

²²Koentjaraningrat, *Op. Cit.*, h. 270.

data yang di peroleh dari penelitian di lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian.

- b. Penandaan data (*coding*) yaitu di lakukan untuk memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yang baku atau literatur yang validitasnya dapat di percaya, dilakukan sebagai usaha untuk meringkaskan data penelitian yaitu dengan memberi simbol angka pada uraian-uraian yang penting yang di dapatkan dari hasil penelitian.
- c. Sistemasi (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dari data yang di peroleh hasil penelitian.

4. Metode Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data adalah ”proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya”.²³ Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisis data yang dapat digunakan. Namun demikian, semua analisis data penelitian kualitatif biasanya mendasarkan bahwa analisis data dilakukan sepanjang penelitian. Dengan kata lain, kegiatannya dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data”.²⁴

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-

²³S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), edisi revisi ketiga, h. 72.

²⁴H.B. Sutopo, *Op. Cit.*, h. 35-36.

bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu “suatu metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari yang hal-hal atau gejala bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum”.²⁵

Metode ini digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan tentang batasan mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang sanksi hukum terhadap kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara khusus kemudian diambil unsur-unsur kesamaannya untuk mendapatkan pemahaman para ahli secara umum.



²⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), cet. ke-v, h. 36.

BAB II

DELIK PENGHINAAN

A. Pengertian Delik

Berbagai peristilahan yang disamakan dengan makna yang terkandung dalam penggunaan kata delik (*delictum*) paling tidak terdapat tujuh peristilahan yang memiliki kesamaan, tersebar dalam berbagai literatur. Diantaranya, ada yang menggunakan kata tindak pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana dan penggunaan terminologi delik itu sendiri.²⁶

Ketujuh peristilahan dalam hukum tersebut sebagai lapangan kajian hukum pidana, semuanya bersumber atas pengertian yang ditarik secara terminologis berdasarkan pengadopsian dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Kata perkata frasa tersebut memiliki arti yang masing-masing berdiri sendiri. *Straf* berarti pidana, hokum, *baar* berarti dapat atau boleh. Sedangkan *feit* memiliki banyak terjemahan, meliputi tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁷

Untuk proses penterjemahan *baar* secara *literlijk* tidaklah menjadi masalah, karena memang tidak terjadi perbedaan mendasar. Tetapi istilah *straf* dan *feit* penterjemahannya oleh para ahli hukum pidana banyak terjadi perbedaan pendapat. Namun terlepas dari itu *straf* tidak cocok jika diartikan hukum, sebab penggunaan

²⁶Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 2005), edisi revisi keempat, h. 27.

²⁷Zaenal Abidin, (et. all.), *Hukum Pidana*, (Jakarta: Prapatanja, 2002) cet, ketiga, h. 9

bahasa Belanda untuk “hukum” sudah lazim digunakan “*recht*”. Sama halnya dengan pemaknaan terhadap istilah *feit* kebanyakan ahli hukum pidana merasa lebih tepat untuk menggunakan istilah perbuatan, bukan menggunakan istilah tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Kata “tindak” tidaklah tepat digunakan untuk menterjemahkan “*feit*” sebab perkataan “tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, lebih konkret untuk menyatakan keadaan seperti kelakuan, gerak-gerik/sikap jasmani, yang lazim dikenal dengan tindak-tanduk, tindakan dan bertindak. Lebih dari pada itu, perkataan “tindak pidana” juga tidak dapat merangkum semua kelakuan manusia dalam arti positif (aktif) maupun dalam arti negatif (pasif). Padahal pengertian yang sebenarnya terkandung dalam strafbaar feit menghendaki dua wujud perbuatan baik yang aktif maupun pasif kiranya dapat dipidana.²⁸

Sama halnya dengan penggunaan peristilahan “peristiwa pidana” juga tidak tepat untuk mengikuti kalimat “boleh dipidana”. Sebab dalam penggunaan kata “peristiwa” tidak hanya menunjuk pada keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh ulah/perbuatan manusia saja, tetapi bisa juga disebabkan oleh kejadian alam yang mana sama sekali di luar kuasa manusia, misalnya: matinya orang karena tertimpa pohon, atau matinya orang karena peristiwa banjir/longsor. Kematian yang disebabkan oleh peristiwa alam pastinya tidak menjadi penting dalam hukum pidana, untuk mencari dan menemukan pelaku yang dapat bertanggung jawab atas peristiwa itu. Bahkan lebih jauh jika terbiasa menggunakan kata “peristiwa” hal itu lebih

²⁸Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), cetakan ke-6, h. 14.

konkret menyentuh aspek keperdataan saja, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian yang tidak menjadi penting untuk dipidanakan.

Hanya kematian yang disebabkan oleh kelakuan orang lain saja baru dapat disangkutpautkan dengan kapasitas untuk pertanggungjawaban pidana. Untuk peristilahan “pelanggaran” mengalami kejanggalan jika digunakan untuk mendefenisikan “*strafbaar feit*” sebab dalam hukum pidana juga dikenal perbendaharaan hukum yang membedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtreding*) yang masing-masing memiliki unsur pidana sebagaimana yang dibedakan penggolongannya dalam KUHP, di dalam buku II (kejahatan) dan buku III (Pelanggaran).

Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan *atrafbaar feit* itu dapatlah dikemukakan beberapa pandangan berdasarkan para pakar hukum pidana, antara lain :

1. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁹
2. Tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁰
3. Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh Peraturan Perundang-undangan.³¹
4. Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³²

²⁹*Ibid.*, h. 55.

³⁰Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 174.

³¹Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990), h. 16.

³²Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: JB Wolters, 1995), h. 87

5. Suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³³

Berdasarkan definisi “*strafbaar feit*” yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum pidana di atas maka termuat beberapa ide pokok untuk mengkonkretkan makna yang dikandungnya, meliputi :

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
2. Terhadap perbuatan itu mengandung kesalahan sehingga dikatakan perbuatannya telah melawan hukum;
3. Atas perbuatan yang dianggap salah haruslah terdapat perumusannya dalam Undang-undang.
4. Kemudian terhadap si pembuat kesalahan mampu bertanggung jawab secara pidana.³⁴

Hal yang paling penting dari berbagai kandungan makna yang terdapat dalam persitilahan “*strafbaar feit*”, adalah kesalahan dari perbuatan pidana harus terdapat rumusannya dalam undang-undang. Maksud dari pada kalimat itu bahwa negara tidak boleh sewenang-wenang menarik orang dalam perbuatan yang salah (dapat dicela) kalau sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. Inilah yang disebut asas legalitas yang sudah turun-temurun masih tetap dipertahankan dalam hukum pidana, terkenal dengan postulat “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”- tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu. Undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya (*moneat lex, piusquam feriat*).

³³Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), cet. Kedua, h. 135

³⁴Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Bandung: Pioner Jaya, 1992), h. 127

B. Jenis-jenis Delik

1. Delik Umum

Kendatipun banyak metode pembagian delik dalam hukum pidana tetapi pada poin ini hanya dibahas pembagian delik berdasarkan perlu tidaknya pengaduan atau dari segi/cara pemeroses hukumnya yakni delik umum dan delik aduan saja. Hal ini disebabkan fokus pengkajian perbuatan pidana dalam penelitian ini adalah delik penghinaan yang dapat terbagi-bagi, ada yang sifatnya sebagai delik umum, adapula yang sifatnya sebagai delik aduan. Beberapa contoh delik aduan dalam delik penghinaan diantaranya penistaan, fitnah, fitnah dengan pegaduan, fitnah dengan perbuatan, dan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Sedangkan jenis delik penghinaan yang sifatnya sebagai delik umum diantaranya penghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu menjalankan dinas dan penghinaan terhadap suku atau agama tertentu.

Delik umum bisa dikatakan menyebar paling banyak dalam Buku II KUHP. Delik umum jika disangkutpautkan dengan delik aduan maka delik ini dalam bahasa Belanda di sebut sebagai "*gewone delicten*". Delik umum adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.³⁵

³⁵E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 238.

2. Delik Aduan

Delik aduan (*klacht delichten*), dari kata *clacht* atau pengaduan berarti hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut.

Pembentuk undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya suatu pengaduan bagi delik tertentu. Adapun sebabnya adalah bahwa dipandang secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan dari pada kerugian-kerugian lain pada umumnya. Menurut MvT (*memori van teoliching*), disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan dari pada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tertentu, sehingga keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.

Pengaturan delik aduan terdapat dalam Buku II KUHP yang tersebar dapat ditemui dalam beberapa ketentuannya. Secara eksplisit syarat pengaduan tersebut

dinyatakan dalam Pasal 319 KUHP. Paling tidak ada tiga bab dalam KUHP yang berkaitan dengan delik aduan yaitu :

- 1) Bab XVI KUHP dalam delik kehormatan yaitu delik penghinaan (*defamation/belededing*). Ada enam perbuatan yang diakualifikasikan sebagai penghinaan yang tergolong sebagai delik aduan yaitu penistaan (*smaad*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belededing*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Kelima bentuk penghinaan tersebut adalah delik aduan yang nyata dan tegas dalam Pasal 319 KUHP, “penghinaan yang dapat dihukum menurut bab ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang menderita kejahatan itu, kecuali dalam hal yang tersebut di Pasal 316 (Penghinaan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan dinas).
- 2) Kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pengancaman dan penggelapan. Pasal 367 ayat (2) KUHP mengatur “jika dia adalah suami isteri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Terhadap Pasal 367 KUHP yang terkait dengan pencurian dalam keluarga ini. Hal yang sama juga berlaku dalam Pasal 370 KUHP mengenai pemerasan dan pengancaman dalam keluarga serta Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga.
- 3) Kejahatan terhadap kesusilaan yakni perzinahan. Dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP ditegaskan “tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUHPerdata, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga.”³⁶

Berdasarkan tiga pembagian delik di atas, pembagian pertama dan ketiga merupakan delik aduan absolut, sedangkan pada poin pembagian kedua merupakan delik aduan relatif. Menurut Tresna, delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya.³⁷

³⁶*Ibid.*, h. 240.

³⁷Tresna, *Op. Cit.*, h. 89.

Pompe dalam Molyatno mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde* van *vervolgbaarheir* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut, sedangkan delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu “*voorwaarde* van *vervolgbaarheir*” atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.³⁸

Pentingnya pembedaan di atas, antara delik aduan absolut dan delik aduan relatif adalah terkait jika beberapa pembagian tindak pidana yang sifatnya wajib diadukan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana yang mana terjadi penyertaan di dalamnya. Bahwa untuk delik aduan yang sifatnya absolut baik yang turut serta maupun dader intelektualnya harus diproses semua secara pidana meskipun kehendak sipengadu hanya ingin mengadukan pelaku kejahatan utamanya saja. Hal kemudian yang berbeda jika delik aduan relatif, walaupun terjadi penyertaan, boleh saja pihak yang turut serta tidak diproses secara pidana, jika si pengadu tidak menghendakinya.

³⁸Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara. 1998), h. 284.

Dalam ilustrasi yang sederhana, Jika misalnya A dan B sepakat menghina C melalui pemuatan tulisan di website, lalu kemudian B menyebarkan lagi tulisan itu melalui jejaring sosial di facebook dan twitter. Berarti untuk dapat dipidanya A harus diadukan terlebih dahulu ke aparat penegak hukum (Kepolisian). Di sisi lain si C memilih untuk tidak mengadukan si B. Dalam hal ini karena penghinaan merupakan delik aduan absolut berarti tidak dibenarkan C hanya mengadukan A saja tetapi juga harus mengadukan B.³⁹

Dalam ilustrasi untuk delik aduan relatif misalnya dalam pencurian keluarga. A memiliki anak B dan C. Pada malam hari B sepakat mencuri uang yang tersimpan di lemari ayahnya yang tersimpan di ruang tamu. B yang mengambil uang itu di lemari, dan C yang menjaga ayahnya (A) yang sedang tidur untuk mengawasi jika Ayahnya terbangun, agar C dapat meminta kepada B untuk menghentikan aksi pencurian uang tersebut. Dalam kejadian ini karena merupakan delik aduan relatif, A sebagai orang tua dapat saja memilih si B saja yang misalnya diadukan sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Pada hakikatnya delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisahpisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga. Itulah sebabnya dalam delik aduan absolut

³⁹*Ibid.*, h. 289.

sering dikatakan pengaduannya tidak dapat dipecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan pada pengaduan delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).

C. Unsur-unsur Delik

Dalam mengkaji semua jenis delik penghinaan mulai dari delik penghinaan konvensional maupun modern, hanya dapat dilakukan jika diketahui metode untuk membagi setiap unsur yang terdapat dalam setiap delik penghinaan tersebut. Lalu dengan tindakan memecah satu persatu unsur-unsur delik penghinaan maka pada saat itu juga akan ditemukan kelemahan atau kekuarangan delik penghinaan modern jika dibandingkan dengan delik penghinaan konvensional, yang bisa dikatakan jauh lebih lengkap landasan filsufisnya merumuskan antara perbuatan kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya.

1. Pengertian unsur delik

Jika konsistensi asas legalitas “tidak ada pidana tanpa undang-undang” dalam hukum pidana dipertahankan maka untuk mengidentifikasi sebuah perbuatan dapat dikatakan “mengandung kesalahan” hingga digolongkan sebagai “perbuatan pidana” berarti elemen delik-lah dalam undang-undang tersebut yang mampu menjelaskannya.

Pertama kali istilah elemen diadopsi dari bahasa Belanda “*bestandeel*” yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan “unsur”, padahal kedua persitilahan tersebut terdapat makna yang berbeda. *Bestandeel* mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara *expressive verbis* tertuang dalam suatu

rumusan delik. Dengan kata lain *bestandeel* merupakan unsur perbuatan pidana yang tertulis saja. Sedangkan elemen-elemen dalam suatu delik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁴⁰

Lazimnya dalam membuktikan terpenuhinya delik yang dilakukan oleh petindak yang perlu dibuktikan hanyalah elemen yang tertulis saja, sementara yang tidak tertulis dalam sebuah ketentuan tidak perlu dibuktikan. Hal ini selanjutnya dipertegas oleh Van Bemmelen “konsekuensi lebih lanjut yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan hanya *bestandeel*.” Dalam membuktikan delik juga tidak semua unsur-unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak ketentuan pidana, hanya sebagian unsur yang dijadikan unsur mutlak perbuatan pidana. Rumusan-rumusan delik itu hanya fragmen-fragmen yang dipisahkan dari hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain dari pada hanya secara skematis saja. Perbuatan konkret yang masuk dalam rumusan delik merupakan sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya diancam pidana, karena rumusan yang fragmentasi dan skematis tadi maka di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak di sana semestinya, karena tidaklah merupakan perbuatan yang tercela atau tidak dibenarkan”.⁴¹

⁴⁰Eddy OS. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014), h. 97

⁴¹*Ibid.*

Adapun tujuan dari pada menguraikan elemen tindak pidana adalah selain sebagai perwujudan asas legalitas, juga berfungsi sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana, sebab dalam hal pembuktian perbuatan pidana berlaku postulat “*actorio incumbit probantia*”, siapa yang mendakwa maka dia yang harus membuktikan. Jika dakwaan tersebut ternyata tidak dapat membuktikan elemen tindak pidana yang berlaku mutlak bagi pelaku tindak pidana, maka terhadap orang yang didakwa harus dibebaskan (*actore non probante, reus absolvitur*).

Selanjutnya untuk pembahasan pada poin berikutnya (poin ke-2) dalam penelaahan unsur-unsur delik akan dibedakan setidak-tidaknya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tergambar ketika merumuskan “*strafbaar feit*” dan berdasarkan sudut pandang undangundang, yaitu terkait dengan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu berdasarkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Unsur-unsur delik

Pada saat membahas pandangan beberapa ahli hukum pidana tentang arti dari pada *strafbaar feit* pada hakikatnya dari cara masing-masing ahli tersebut memberi rumusan, sudah tergambar bagian kecil dari elemen tindak pidana. Berikut akan dikemukakan pandangan terhadap pembagian unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno, Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk :

- a. Menurut Moeljatno, unsur delik terbagi tiga: (a) Perbuatan; (b) Yang dilarang oleh aturan hukum; dan (c) Ancaman pidana bagi yang melanggar;
- b. Menurut Tresna unsur delik terdiri atas: (a) Perbuatan/ rangkaian perbuatan manusia; (b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (c) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur delik adalah: (1) Kelakuan manusia; (2) Diancam dengan pidana; (3) Dalam peraturan perundangundangan.
- d. Dari sudut pandang monisme, Jonkers juga merinci unsur-unsur delik meliputi: (a) Perbuatan; (b) Melawan hukum; (c) Kesalahan; (d) Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Schravendijk, unsur-unsur delik meliputi: (a) Kelakuan; (b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; (c) Diancam dengan hukuman; (d) Dilakukan oleh orang; (e) Dipersalahkan.⁴²

Memang pada dasarnya dalam mencermati beberapa rumusan delik tertentu dalam KUHP, pada buku II (kejahatan) dan buku III (pelanggaran). Dari pendapat para ahli hukum pidana yang menguraikan unsur-unsur delik ternyata terdapat beberapa unsur yang seringkali berulang atau tertulis berkali-kali dalam beberapa ketentuan, diantaranya mengenai tingka laku, kesalahan, melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Lebih lanjut menurut Adami Chazawi mengemukakan unsur-unsur delik tertentu dalam UU (KUHP) dengan sebelas (11) pembagian :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur kualitas objek tindak pidana;
- j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;⁴³

⁴²*Ibid.*, h. 100

⁴³Adami Chazawi, *Op. Cit.* h. 82.

Berdasarkan sebelas unsur yang dikemukakan oleh Adami Chazawi di atas, maka pada unsur kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur subjektif. Sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Kendatipun demikian, bahwa apa yang dimaksud unsur melawan hukum juga tidak selamanya dapat dipandang merupakan unsur subjektif, misalnya unsur melawan hukum dalam delik pencurian. Bahwa frasa dari melawan hukum dalam Pasal 362 terletak dalam mengambil barang milik orang lain itu di luar persetujuan kehendak pemilik sehingga melawan hukumnya justru bersifat objektif, akan tetapi dalam KUHP memang unsur melawan hukum lebih banyak diberlakukan sebagai unsur subjektif, seperti Pasal 378 (penipuan), Pasal 368 (pemerasan), Pasal 369 (pengancaman) dan Pasal 372 (penggelapan).⁴⁴

Pertanyaan selanjutnya; bagaimana cara merumuskan agar sebuah umusan tindak pidana dapat tepat dalam memformulasikan mana yang tergolong sebagai unsur subjektif dan mana unsur objektif?. Maka dibutuhkan kecermatan untuk mengetahui kalau unsur itu, batin atau melekat dalam keadaan batin si pembuat pidananya berarti itu adalah unsur subjektif. Namun dalam hal unsur itu berada di luar keadaan batin manusia (si pembuat pidana) seperti semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan, dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan objek tindak pidana maka sudah pasti tergolong sebagai unsur objektif.

⁴⁴*Ibid.*

D. Penggolongan Delik Penghinaan Umum

Tindak pidana penghinaan sering pula disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam pemuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya yang harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geode naam*).⁴⁵

Kehormatan dan nama baik merupakan hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Hal ini juga dikuatkan bahwa hanya manusia yang diakui sebagai subjek hukum, yang mana didalam diri manusia melekat hak dan kewenangan dijamin dan dilindungi secara hukum.

Di bawah ini akan diuraikan penggolongan delik penghinaan yang dikategorikan sebagai delik penghinaan umum. Dikatakan sebagai delik penghinaan umum karena diatur dalam Bab tersendiri di KUHP yaitu pada Bab XVI, mulai dari Pasal 310 s/d Pasal 321 KUHP. Selain itu, bentuk bentuk penghinaan tersebut memiliki sifat dan ciri yang sama. Bahwa semua bentuk penghinaan di dalamnya mengandung sifat penghinaan bagi pribadi-pribadi orang atau bersifat individu. Rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik orang yang menjadi objek

⁴⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.

penghinaan umum adalah pribadi-pribadi tertentu. Secara jelas siapa orang yang rasa harga dirinya mengenai kehormatan dan nama baiknya yang diserang, dan siapa pula berhak mengajukan pengaduan tertera secara jelas. Adanya pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan pengaduan dalam penghinaan (orang yang terkena kejahatan atau ahli warisnya) adalah sebagai indikator bahwa sifat pribadi dari kejahatan penghinaan yang dikategorikan sebagai penghinaan umum ini sangat menonjol.

1. Penghinaan lisan dan penistaan tertulis

Baik penghinaan lisan maupun dengan tertulis kedua-duanya diatur dalam Pasal 310. Pada ayat (1) mengatur masalah penistaan yang dilakukan secara lisan sedangkan pada ayat (2) mengatur penistaan yang metodenya dilakukan secara tertulis. Pasal 310 ayat (1) KUHP menegaskan “barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4. 500, 00. Jika diuraikan satu persatu delik penistaan lisan di atas, maka dapat dibagi penggolongan unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif terdiri dari barang siapa; dengan sengaja menyerang; dengan maksud yang nyata
- b. Unsur objektif terdiri dari kehormatan atau nama baik seseorang; menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu; supaya diketahui umum

Frasa barang siapa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah setiap orang. Sedangkan antara dengan sengaja menyerang dan maksud yang nyata merupakan satu kesatuan unsur yang pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan oleh karena munculnya perbuatan untuk menyerang sudah merupakan bagian dari pelaksanaan niat dan pastinya menyatu dengan kehendak sipembuat pidananya agar serangan terhadap nama baik dan kehormatan itu kiranya dapat diketahui oleh umum. Untuk unsur objektif, yakni objek dari perbuatan pidana itu maka harus diuraikan diantaranya: apa yang dimaksud kehormatan dan nama baik; apa yang dimaksud menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu; dan apa yang dimaksud diketahui umum?.

Kehormatan adalah rasa harga diri seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai yang baik (adab) dalam pergaulan sesama anggota masyarakat. Sedangkan nama baik adalah rasa harga diri orang yang disandarkan pada kedudukan sosial dan sifat-sifat pribadi yang dimiliki seseorang. Nama baik dan kehormatan merupakan sesuatu yang adikodrati melekat dalam diri seseorang sebagai hak dasar yang harus dilindungi. Bukan semata-mata karena orang tersebut memiliki pekerjaan atau profesi tertentu lalu dia dikatakan memiliki nama baik.

Menuduh melakukan suatu perbuatan adalah content (isi) dari penghinaan tersebut sebagai tuduhan yang bersifat tindakan (perbuatan) terhadap seseorang yang dituduh pernah melakukan perbuatan tercela (jahat) tetapi pada sesungguhnya tidak demikian. Supaya diketahui umum adalah perbuatan yang sifatnya menista harus tersampaikan di depan umum/khalayak, sehingga

perbuatannya baru dapat dikategorikan sebagai delik penistaan lisan. Hal yang paling sulit sebenarnya untuk dicari batasannya dalam unsur ini adalah bagaimana batasan yang dimaksud diketahui oleh “umum” itu? Setidak tidaknya untuk “mengunci” batasan pengertian umum, tidak mesti dengan ukuran kuantitas jumlah orang yang mengetahuinya, tetapi harus diukur dari tempat atau media mana (apakah di media terbuka atau tertutup) dilakukan.

Penghinaan secara tertulis diatur dalam Pasal 310 ayat (2) menegaskan “kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan, maka perbuatan karena salahnya menista dengan surat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya selama satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4500, 00.” Pada ketentuan dengan pensitaan tertulis ini, semua unsur yang terdapat dalam penistaan lisan harus dimasukkan pula dalam ketentuan ini. hal yang membedakan hanya pada metodenya (yaitu tertulis). Kemudian dilakukan melalui surat atau gambar; disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan. Surat atau gambar yang dimaksud adalah isinya bermuatan penghinaan baik dibuat dalam bentuk tertulis di atas kertas (surat) atau bisa pula dalam bentuk gambar yang diletakkan dalam kertas. Sedangkan disebar atau disiarkan adalah tulisan atau gambar tersebut dibuat lebih dari satu helai, atau lebih dari satu eksampler.

Adapun yang dimaksud pertunjukan adalah tulisan atau gambar tidak perlu jumlah tetapi dapat dibaca dan dilihat oleh umum/ khalayak. Kata-kata disiarkan, dipertunjukan, ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat orang

lain. Sebab jika suatu gambar ditempel di ruangan tertutup, maka hal itu bukan dimaksudkan untuk diketahui orang lain atau dipertunjukkan untuk umum karena ruangan tertutup tidak dapat dimasuki setiap orang atau umum.

2. Penghinaan berat dan penghinaan ringan

Jika dilakukan penelusuran dalam Bab XVI KUHP tidak ditemukan istilah penghinaan berat, cuma terdapat penghinaan ringan. Hanya tercantum dalam penjelasan yang dikemukakan oleh R. Soesilo “bahwa jika perbuatan menista itu bermuatannya menuduhkan melakukan suatu perbuatan maka termasuk penghinaan berat, tetapi jika tuduhannya dengan istilah maka hal itu dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Terkait dengan itu maka dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penghinaan yang dikategorikan sebagai penghinaan berat.”⁴⁶

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari bahasa Belanda *eenvoedige belediging*. Sebagian ahli hukum pidana menterjemahkannya dengan kata “biasa”, dan sebagian lagi menterjemahkannya dengan kata “ringan”. Dalam kamus bahasa belanda *eenvoudige* diartikan sederhana, bersahaja, dan ringan. Dengan demikian, tidaklah tepat jika digunakan penghinaan biasa.

Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menegaskan “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan surat, yang dilakukan terhadap seseorang baik dengan lisan atau dengan surat baik

⁴⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1995), h. 228

dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, baik dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena salahnya penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan Pasal 315 KUHP di atas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Penghinaan;
- b. Sengaja;
- c. Tidak bersifat menista atau menista dengan surat;
- d. Dimuka umum, dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, dengan surat atau yang dikirimkan kepadanya.⁴⁷

Ada beberapa poin yang menjadi catatan dalam ketentuan penghinaan ringan ini, diantaranya :

- a. Bahwa setiap unsur yang terdapat di dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (penistaan lisan dan tertulis) dapat digunakan unsurnya-unsurnya untuk membuktikan penghinaan ringan jika muatan penistaan itu dengan istilah (seperti: anjing, sundal, bajingan, sinting, dst).
- b. Dapat pula terpenuhi sebuah perbuatan sebagai penghinaan ringan, walaupun bukan termasuk bagian dari penistaan (yang tidak memenuhi muatan melakukan suatu perbuatan atau bukan pula penistaan dengan istilah) tetapi dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap kehormatan dan nama baik orang lain maka juga dikategorikan sebagai penghinaan ringan.
- c. Penghinaan ringan dapat pula terpenuhi sebagai perbuatan pidana walaupun serangan terhadap kehormatan dan nama baik tidak tersiar (tersebar) di depan umum, sebab dalam salah satu unsurnya ditegaskan bahwa termasuk penghinaan ringan jika hal itu dilakukan terhadap di muka orang itu sendiri. Jadi, kalau ada orang yang meskipun dalam ruangan tertutup berdua, lalu satu orang menghina orang yang kedua itu, maka terpenuhi sebagai penghinaan ringan. Hal ini berlaku pula dalam hal terdapat seorang yang mengirimkan surat kepada orang lain yang isinya penghinaan meskipun muatan penghinaan itu tidak tersebar ke depan umum, tetap dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Tentu berbeda jika si pengirim surat mengirim surat kepada orang lain,

⁴⁷ *Ibid.*, h. 232

tetapi ternyata orang yang dimaksud untuk dihina bukan yang menerima surat itu, maka dalam kasus ini tidak termasuk sebagai penghinaan ringan oleh karena tidak terpenuhi maksud di muka orang itu sendiri melalui surat.⁴⁸

3. Fitnah

Perkataan yang menjelekkan seseorang merupakan arti kamus yang sering kali dipergunakan dalam berbagai literatur sosial untuk mendefensikan arti fitnah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari fitnah diartikan menuduh seorang melakukan perbuatan yang pada sesungguhnya itu tidak benar, adalah tidak pernah dilakukannya.

Fitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menegaskan "barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan surat, dalam hal ia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhannya itu dihukum karena salahnya fitnah dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun, jika ia tidak dapat membuktikan kebenaran itu dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya sedang tidak benar".

Perbedaan mendasar yang terdapat antara penistaan lisan maupun tertulis dengan fitnah adalah terdapatnya unsur kepada si pembuat pidana (penista) untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Namun diberikannya kewenangan kepada penista untuk membuktikan tuduhannya hanya dapat dilakukan jika ada izin untuk membuktikan yang ditetapkan dalam hal: (a) Untuk kepentingan umum; (b) Untuk mempertahankan diri; (c) Yang difitnah adalah pegawai negeri yang menjalankan tugasnya.

⁴⁸ *Ibid.*

Hal ini diatur dalam Pasal 312 KUHP yang menegaskan bahwa :

- a. Kalau hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu, supaya dapat menimbang perkataan terdakwa bahwa Ia melakukan perbuatan itu untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena kepentingan terpaksa untuk membela diri;
- b. Kalau seorang pegawai negeri dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan jabatannya.⁴⁹

Antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 312, bagi si penista yang jika objek terhinanya adalah pegawai negeri maka posisi si penista disitu berhak untuk membuktikan tanpa ada embel-embel perbuatan itu adalah terkategori sebagai kepentingan umum dan kepentingan terpaksa untuk membela diri. Begitu muncul keberatan dari pegawai negeri sebagai objek yang difitnah maka pelakunya sudah dapat membuktikan tuduhan walaupun ditingkat penyidikannya.

Penerapan Pasal 311 KUHP juga diatur dalam Pasal 314 KUHP yang menegaskan :

- a. Kalau orang yang dihina, dengan keputusan hakim yang sudah tetap, dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, penghukuman karena fitnah tidak boleh dijatuhkan;
- b. Jika dengan putusan hakim yang sudah tetap Ia dibebaskan dari tuduhan melakukan perbuatan itu, maka putusan hakim itu dipandang menjadi bukti yang cukup bahwa tuduhan itu tidak benar;⁵⁰

Kemudian diatur pula pembatasan Pasal 311 KUHP atas pembuktiannya melalui Pasal 313 dalam hal “pembuktian dimaksud pasal 311 tidak diizinkan, jika perbuatan dituduhkan itu tidak boleh dituntut melainkan atas pengaduan dan

⁴⁹*Ibid.*, h. 229

⁵⁰*Ibid.*, h. 227

pengaduan itu tidak dimasukkan.” Satu dan lain hal, hadirnya pembatasan untuk membuktikan tuduhan karena fitnah, baik karena pemberian izin oleh hakim (karena alasan kepentingan umum dan membela diri), maupun dasar untuk membuktikan benarnya fitnah bersandar pada putusan pengadilan atas orang yang terfitnah, dan ukuran untuk memberikan kewenangan kepada si penghina karena fitnah, atas muatan fitnah itu merupakan delik aduan maka harus ada pihak yang mengadukan. Semuanya, semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum karena pemisahan penanganan antara fitnah dengan perbuatan yang dituduhkan dapat menimbulkan keraguraguan atas kepastian hukum.

4. Fitnah dengan pengaduan

Dalam bahasa Belanda fitnah pengaduan disebut “*lasterilijk aanklacht*”, yang diterjemahkan pemberitahuan fitnah, mengadu dengan memfitnah. Cuma saja terdapat kerancuan jika istilah mengadu dengan memfitnah digunakan, oleh karena jika mengadu dengan fitnah maka yang menjadi masalah utama adalah mengadu, sedang dalam masalah ini yang dipermasalahkan adalah fitnah atau penghinaannya. Adapun terdapatnya frasa pengaduan hanyalah merupakan metode untuk tersampainya penghinaan tersebut terhadap orang yang dituju.⁵¹

Dengan mencermati bunyi dari Pasal 317 ayat (1) KUHP yang menegaskan “barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang pada pembesar negeri, sehingga kehormatan atas nama baik orang itu

⁵¹Leden Marpaung, *Op.Cit.*, h. 36

terserang dihukum karena salahnya fitnah dengan pengaduan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan.” Jika diurai satu persatu ketentuan dari bentuk penghinaan ini (fitnah dengan pengaduan) maka dapat dibagi beberapa unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja;
- c. Menyampaikan laporan atau pengaduan tertulis palsu;
- d. Disampaikan kepada penguasa;
- e. Tentang orang tertentu;
- f. Isinya menyerang kehormatan atau nama baik orang tersebut.⁵²

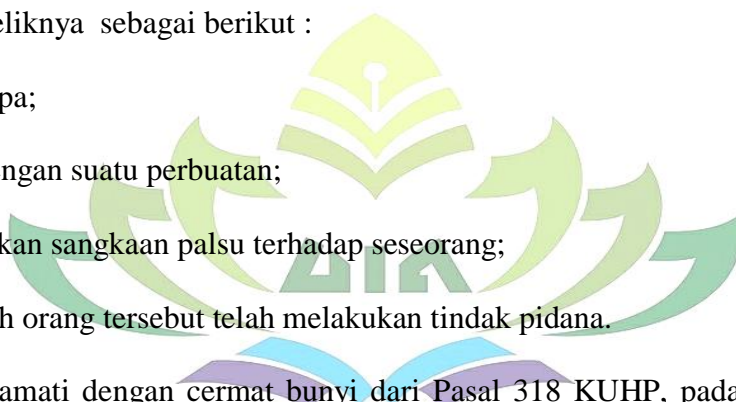
Berdasarkan uraian dari pembagian unsur Pasal 317 KUHP bahwa yang menjadi unsur pembeda fitnah dengan pengaduan dibandingkan dengan jenis delik penghinaan lainnya, yaitu adanya perbuatan mengadukan seseorang ke pembesar/penguasa yang mana disampaikan secara lisan maupun secara tertulis yang kemudian ditulis oleh penerima laporan atau pengaduan.

Dalam penggolongan penghinaan ini, juga dari perbuatan pengaduan atas laporan yang disampaikannya harus palsu agar terpenuhi sebagai fitnah. Orang itu harus mengetahui benar-benar, bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu tidak benar, sedang pengaduan demikian akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan. Terdapat pengecualian dalam penghinaan yang dikategorikan sebagai fitnah dengan pengaduan, bahwa si pengadu kepada pembesar negeri tidak dapat dihukum jika apa yang diadukan atau yang diberitahukan itu keliru atau kurang betul (tidak disengaja).

⁵²R. Soesilo, *Op. Cit.*, h. 318.

5. Fitnah dengan perbuatan

Fitnah dengan perbuatan diterjemahkan dari bahasa Belanda “*lasterlijke verdachtmakin*”. Sebagian ahli hukum pidana juga menterjemahkannya dengan “persangkaan palsu”.⁵³ Lebih jelasnya fitnah dengan perbuatan diatur dalam Pasal 318 yang menegaskan “barang siapa sengaja dengan suatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka membuat tindak pidana dihukum karena salahnya memfitnah dengan perbuatan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan.” Maka berdasarkan rumusan Pasal 318 KUHP, maka unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

- 
- a. Barang siapa;
 - b. Sengaja dengan suatu perbuatan;
 - c. Menyebabkan sangkaan palsu terhadap seseorang;
 - d. Seolah-olah orang tersebut telah melakukan tindak pidana.

Jika diamati dengan cermat bunyi dari Pasal 318 KUHP, pada dasarnya sifat pembeda dengan delik penghinaan lainnya terdapat pada unsur .adanya perbuatan, sehingga menyebabkan ada orang yang terfitnah sebagai pelaku tindak pidana padahal sesungguhnya bukanlah dia pelakunya, maka itulah yang dimaksud sebagai memfitnah dengan perbuatan atau sebuah persangkaan palsu. Contoh: A memiliki Handphone, lalu kemudian Handphone miliknya disimpan di tas B. kemudian A menuduh B sebagai pencuri dari Handphone-nya. Jika hal ini

⁵³Wiryono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Erasco, 1999), h. 187

terbukti, ternyata A sendiri yang menyimpan Handphone miliknya di tas B, maka A akan dianggap telah melakukan fitnah dengan perbuatan terhadap B.

6. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal

Sejatinya penghinaan terhadap orang yang meninggal tidaklah terjadi penyerangan terhadap kehormatan. Sebab bagaimana mungkin, orang yang sudah meninggal akan keberatan, merasa martabat dan kehormatannya terhinakan sementara segala hak-hak yang melekat dalam dirinya sudah tidak ada lagi. Tapi diluar konteks itu, ternyata masih ada keluarganya yang harus dihargai hak-haknya karena adanya hubungan/ikatan darah dengan orang yang sudah meninggal. Kendatipun keluarganya yang sudah meninggal tidak mungkin keberatan atas penghinaan yang dilakukan terhadapnya, sekiranya dia masih hidup, namun keluarga yang masih hidup pastinya akan merasakan nama baik dan kehormatan, sebagai keluarga secara mayoritas terhinakan.

Rumusan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal terdapat dalam dua pasal, yakni Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. Pasal 320 KUHP menegaskan “barang siapa melakukan terhadap orang yang sudah meninggal suatu perbuatan yang bersifat menista atau menista denga surat, jika sekiranya ia masih hidup, dihukum penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.” Selanjutnya dalam Pasal 321 ditegaskan pula “barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu supaya diketahui oleh umum

atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman penjara satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.”

Pada Pasal 320 KUHP bentuk penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal harus dimaknai perbuatan penghinaannya sebagai perbuatan menista dengan lisan atau dengan tulisan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Hanya saja yang membedakan dengan Pasal 310 KUHP dengan Pasal 320 KUHP adalah pada objek yang terhina itu. Sehingga jika terjadi delik penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal karena juga merupakan delik aduan, maka yang dapat mengajukan pengaduan atas penghinaan tersebut, harus dilakukan oleh keluarga dari yang sudah meninggal sebagaimana batasan yang ditentukan dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) KUHP “bahwa pengaduan dapat dilakukan oleh seorang keluarga dalam keturunan yang lurus atau menyamping, atau dapat pula dilakukan oleh pengaduan orang lain yang sudah mendapat kekuasaan atas kebiasaan adat-istiadat keturunan ibu/ kekuasaan bapak dari orang yang sudah meninggal itu”.

Hal yang membedakan antara Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP, kalau pada Pasal 320 KUHP perbuatan itu sebatas penistaan lisan dan tulisan saja terhadap orang yang sudah meninggal. Sedangkan pada Pasal 321 KUHP berupa penistaan tulisan atau gambar yang terjadi penyiaran ke khalayak. Orang itu haruslah mempunyai maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina atau menista itu tersiar atau lebih tersiar lagi. Hanya saja yang menjadi pengecualian dalam Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP kalau jenis deliknya merupakan penghinaan

ringan terhadap orang yang sudah meninggal, tidak terakomodasi dalam ketentuan penghinaan di dalam KUHP, maka dari itu kalau terjadi penghinaan ringan yang mana objek terhinanya orang yang sudah meninggal berarti tidak dapat dihukum.

E. Penggolongan Delik Penghinaan Khusus

Dikatakan sebagai penggolongan penghinaan dengan delik penghinaan khusus oleh karena kualifikasi penghinaan ini terdapat di luar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk kedalam pasal yang berbeda-beda objek terhinanya. Dengan kata lain kepentingan hukum yang dilindungi sebagai dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana berada dalam Bab yang berbeda di KUHP. Sebagai bentuk penghinaan khusus tentu memiliki sifat lain dan ciri dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam Bab XVI. Kendatipun demikian, masih ada juga sifat yang sama diantara bentuk penghinaan tersebut. Sifat yang sama ini dapat dilihat pada objek penghinaan, yaitu mengenai “rasa” atau “perasaan harga diri” atau “martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang”.

Adapun perbedaannya, penghinaan umum hanya dapat dilakukan pada objek orang semata. Tetapi pada penghinaan khusus, ada bentuk penghinaan yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan/lembaga negara, seperti Pemerintah RI (Pasal 154 KUHP), penghinaan terhadap agama (Pasal 156 A KUHP), penghinaan terhadap bendera dan lambang negara (Pasal 142 A dan Pasal 154 KUHP).

1. Penghinaan terhadap Kepala Negara

Pada pembagian delik penghinaan khusus ini tidak akan dibahas beberapa bentuk penghinaan terhadap kepala negara, dalam hal ini penghinaan terhadap kepala negara Indonesia (Presiden dan Wakil Presiden) oleh karena ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137 KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, berdasarkan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Adapun yang menjadi *ratio decidendi* sehingga MK mencabut Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP sebagai berikut :

- a. Ketika permohonan pengujian para pemohon terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP diajukan telah terjadi (dan berlaku mengikat), pada perubahan ketiga UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan atau *souvergnity* berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pilihan pemimpin rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkan memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substansif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian hal dimaksud bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;
- b. Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945

- dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28 E UUD NRI 1945;
- c. Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat penegak hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945;
 - d. Oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana halnya penghinaan terhadap penguasa atau badan publik lainnya memang seharusnya penuntutan dilakukan terhadapnya atas dasar pengaduan. Di beberapa negara antara lain: Jepang penghinaan terhadap kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri, guna pengajuan penuntutan dan apabila penghinaan dimaksud terhadap seorang Raja atau Presiden suatu negeri asing, maka Wakil Negeri yang berkepentingan itu akan membuat pengaduan atas namanya. Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 270 KUHP oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tersebut.
 - e. Selain itu keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 7 A UUD NRI 1945 yang berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela, maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Karena upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - f. Berdasarkan hal-hal yang di atas, Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI 1945 tidak relevan lagi jika dalam KUHP memuat Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresi pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.⁵⁴

⁵⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 191

Dengan demikian dalam RUU KUHP yang merupakan upaya pembaruan KUHP warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Terlebih lagi ancaman terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Kendatipun masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli karena dihilangkannya Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP melalui putusan MK, tetapi penghinaan terhadap kepala negara sahabat/ kepala negara lain dalam KUHP tetap masih dipertahankan. Pertanyaannya adalah apakah putusan MK lebih melindungi kepala negara lain dibandingkan dengan kepala negara sendiri? Semua jawabannya kembali semata-mata karena negara Indonesia mengakui prinsip demokrasi berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, jika saja Pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden kiranya tetap dipertahankan, lalu negeri ini dalam keadaan jaminan hak-hak warga negara oleh negara belum dapat dijamin secara penuh. Sebuah kepantasan jika kritik banyak disuarakan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Lalu dalam memberikan kritik itu, siapa bisa menjamin benar adanya nada kritik demikian bermuatan penghinaan. Karena itulah penghinaan yang memungkinkan akan memunculkan

banyak kasus terhadap yang objeknya Presiden atau Wakil Presiden harus diantisipasi jauh dari awal.

Penghinaan terhadap kepala negara sahabat diatur dalam Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144 KUHP. Pasal 142 KUHP melindungi kehormatan dan nama baik kepala negara sahabat, sedangkan Pasal 143 melindungi kehormatan dan nama baik yang mewakili negara asing di Indonesia. Lalu pada Pasal 144 KUHP mencakup perlindungan kehormatan dan nama baik kepala negara sahabat sekaligus yang mewakili negara asing di Indonesia yang dilakukan dengan cara menyiarkan, tertulis, atau gambar/lukisan. Pasal 142 menegaskan “penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara lainnya dari negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.⁵⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 142 KUHP di atas maka yang dapat menjadi unsur-unsurnya, meliputi: penghinaan; dengan sengaja; terhadap kepala negara sahabat. Dua unsur yang penting untuk dijelaskan yakni “penghinaan; dan terhadap kepala negara sahabat”. Lebih awal harus diketahui kalau delik penghinaan terhadap kepala negara sahabat merupakan delik umum (bukan delik aduan). Tetapi untuk menelaah apa yang dimaksud penghinaan dalam Pasal 142 KUHP, mau tidak mau tetap harus dikaitkan dengan penghinaan dalam bentuk penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP. Adalah tidak mungkin arti penghinaan di Pasal 142 KUHP akan sama maknanya dengan Pasal 310 KUHP

⁵⁵R. Suesilo, Op. Cit., h. 335

yang terbagi dalam penistaan lisan dan tertulis sebab hal ini diatur kemudian dalam Pasal 144 penghinaan terhadap kepala negara yang dilakukan secara tertulis.

Sedangkan yang dimaksud kepala negara sahabat pada umumnya ditafsirkan sebagai kepala negara yang harus dilindungi dari negara yang pernah melakukan perjanjian dengan Indonesia atau dari negara yang telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia dan tidak bertikai atau bermusuhan dengan Indonesia.

Berlanjut ke Pasal 143 KUHP yang menegaskan “penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang mewakili negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Unsur-unsur dari Pasal 134 KUHP kemudian diurai satu persatu, meliputi: penghinaan; dengan sengaja; terhadap orang yang mewakili negara asing; di Indonesia.

Dalam Pasal 134 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan orang yang mewakili negara asing di Indonesia adalah perwakilan atau duta besar atau diplomatik negara asing. Sedangkan yang dimaksud di Indonesia dapat diartikan “wakil negara asing yang bertugas di Indonesia, tidak termasuk wakil negara asing yang bertugas di negara lain.” Terakhir, ketentuan penghinaan yang mengatur tentang penghinaan terhadap kepala negara lain diatur dalam Pasal 144 yang menegaskan “barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan, di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang

memerintah, atau kepala lainnya dari negara sahabat atau orang yang mewakili negara asing di Indonesia dengan maksud supaya isinya yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Terhadap bunyi Pasal 144 KUHP di atas pada dasarnya mengakomodasi dua objek terhina; baik kepala negara sahabat maupun orang yang mewakili negara asing atas perbuatan orang yang melakukan penghinaan dengan cara tulisan atau lukisan lalu kemudian menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkannya, sehingga diketahui oleh umum.

2. Penghinaan terhadap simbol-simbol negara

Penghinaan terhadap simbol-simbol negara juga merupakan delik umum, yang tidak memerlukan pihak yang dirugikan secara hukum (pidana) agar mengajukan pengaduan sehingga delik tersebut dapat diproses secara hukum (dituntut). Seringkali penghinaan terhadap simbol-simbol negara yang masih dipertahankan dalam KUHP dipertanyakan, oleh karena simbol-simbol negara merupakan benda mati masih dianggap sebagai bagian dari yang tidak boleh “dihinakan”, berbeda halnya dengan penghinaan terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden, serta penghinaan terhadap pemerintahan Indonesia sudah dihilangkan dalam KUHP berdasarkan putusan MK.

Dalam hemat penulis, memberi argumentasi atas masih dipertahankannya penghinaan terhadap bendera dan lambang negara, oleh karena simbol negara yang demikian tidak pernah dianggap dapat bertanggung jawab atas segala kepentingan

warga negara yang berkaitan dengan tugas-tugas fungsi negara. Bendera kebangsaan dan lambang negara tidak lain sebagai identitas negara saja yang patut dihargai sebagai simbol perwujudan masyarakat dan kebangsaan semata. Sehingga sebagai lambang identitas negara jika dihinakan maka wajar negara “berang” atas perbuatan itu, dengan menindaknya secara hukum.

Tindak pidana menodai bendera kebangsaan dan lambang negara RI, oleh pembentuk UU telah diatur dalam Pasal 154 a KUHP yang menegaskan “barang siapa yang menodai bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah.”

Berdasarkan redaksi dari Pasal 154 a KUHP tersebut maka terdiri dari unsur objektif, diantaranya: menodai; bendera kebangsaan RI; dan lambang negara RI. Salah satu yang menjadi permasalahan dari unsur Pasal 154 a KUHP yakni tidak dijelaskannya apa yang dimaksud dengan menodai. Oleh sebab itu sepertinya penafsiran tentang penodaan lebih diserahkan kepada penafsiran hakim tentang perbuatan yang tergolong sebagai bentuk penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara.⁵⁶

Mengenai unsur bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI hal ini sudah jelas artinya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 dan Pasal 36 A UUD NRI 1945. Bendera kebangsaan RI adalah sang merah putih, sedangkan

⁵⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum dan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 456.

lambang negara RI adalah lambang Garuda Pancasila. Satu lagi permasalahan yang menimbulkan pertanyaan dalam Pasal 154 a KUHP, yakni apakah dalam perumusan pasal tersebut termuat pula unsur kesengajaan dari perbuatan delik penghinaannya? Walaupun di dalam rumusan ketentuan itu, pembentuk UU tidak mensyaratkan harusnya ada unsur kesengajaan (*opzet*) pada diri pelaku.

Kiranya tidak dapat disangkal kebenarannya, bahwa perbuatan menodai bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI harus dilakukan dengan sengaja. Sehingga unsur sengaja dalam satu kesatuan dengan Pasal 154 a KUHP, maka dapat diuraikan unsur kesengajaan yang harus dibuktikan dalam penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI, meliputi :

- a. Bahwa pelaku telah menghendaki untuk menodai bendera kebangsaan dan lambang negara RI;
- b. Bahwa pelaku itu mengetahui, bahwa yang dinodai adalah bendera kebangsaan RI dan atau lambang negara RI. Jika saja kehendak menodai bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI ataupun pengetahuan pelaku tentang bendera kebangsaan atau lambang negara RI itu tidak terpenuhi, maka hakim kelak yang mengadilinya harus memberikan putusan pembebasan dari tuntutan hukum bagi pelaku (*onstlagh van rechtsvervolging*).

3. Penghinaan terhadap Pemerintah RI

Sama halnya dengan pencabutan Pasal atas penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terdapat dalam Pasal 134, 136 bis dan Pasal 137 KUHP sudah dihilangkan dalam KUHP melalui judicial review di MK.

Penghinaan terhadap pemerintah RI juga pada dasarnya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI. Oleh karena itu menjadi tidak relevan juga untuk membahas segala peraturan yang terkait dengan penghinaan yang objek terhinanya adalah pemerintah Indonesia.

Diantara ketentuan yang pernah dijadikan sebagai landasan penghinaan terhadap pemerintahan Indonesia adalah Pasal 154 KUHP (tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintahan di depan umum; Pasal 155 KUHP (tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau gambar yang isinya mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia).

Lebih jelasnya pencabutan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP melalui amar Putusan MK Nomor 6/ PUU-V/ 2007, sebagai berikut :

- a. Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- b. Menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945;
- c. Menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Menyatakan permohonan pemohon selebihnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara RI sebagaimana mestinya.⁵⁷

Sekedar untuk membandingkan objek penghinaan antara Pasal 154, Pasal 155 KUHP; dengan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP, adalah pada Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 objek terhinanya yakni Presiden dan/ atau

⁵⁷R. Soesilo, *Op. Cit.*, h. 339.

Wakil Presiden. Sementara Pasal 154 dan Pasal 155 objek terhinanya yaitu pemerintah Indonesia. Sepintas lalu memang Presiden dan/atau wakil Presiden juga adalah bagian dari pemerintahan Indonesia, tetapi yang menjadi pembedanya bahwa kalau pemerintahan Indonesia masuk pula di dalamnya para menteri negara yang merupakan pembantu pembantu Presiden dan Wakil Presiden.

4. Penghinaan terhadap kekuasaan umum

Delik penghinaan terhadap kekuasaan umum diatur dalam dua ketentuan di KUHP, yaitu dalam Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP. Satu yang dilakukan hanya penghinaan dengan lisan dan tulisan saja terhadap kekuasaan umum itu, sedangkan yang satunya lagi diikuti dengan tindakan menyebarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan penghinaan tersebut yang dilakukan kepada kekuasaan umum sehingga khalayak publik mengetahuinya.

Lebih jelasnya Pasal 207 KUHP menegaskan “barang siapa dengan sengaja di depan umum menghina dengan lisan dan tulisan, suatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau lembaga umum yang terdapat di sana, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan pidana denda dengan empat ribu lima ratus rupiah.” Jika Pasal 207 KUHP di atas, diurai satu persatu unsur-unsurnya maka dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja.
- b. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Menghina dengan lisan atau dengan tulisan;
 - 2) Di depan umum;

3) Suatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau suatu lembaga umum yang terdapat di sana.

Unsur subjektif dengan sengaja dalam Pasal 207 KUHP di atas harus dimaknai kata sengaja tersebut meliputi semua unsur-unsur tindak pidana, yang dalam rumusan tindak pidana tersebut oleh pembentuk UU telah diletakkan di depannya. Oleh karena itu dalam merumuskan terbukti tidaknya pelaku sehingga memenuhi perbuatannya dalam melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum, harus dibuktikan segala unsur kesengajaannya bahwa :

- a. Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau dengan tulisan;
- b. Pelaku telah mengetahui penghinaannya telah Ia ucapkan atau Ia lakukan di depan umum;
- c. Pelaku mengetahui penghinaannya telah Ia tujukan pada suatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau pada suatu lembaga umum yang terdapat di Indonesia.⁵⁸

Selanjutnya beralih kepada unsur objektif yang terbagi dalam beberapa poin. Untuk unsur objektif yang pertama, menghina dengan lisan dan tulisan memiliki arti yang sama dengan penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP, hanya saja sifat yang membedakan penghinaan yang dilakukan terhadap kekuasaan umum objek terhina yang terdapat dalam Pasal 207 yaitu kekuasaan umum.

Lalu pada unsur objektif yang kedua frasa “di depan umum” --- (in het openbaar). Hal ini tidak selamanya berarti penghinaan tersebut harus selalu dilakukan di tempat umum, melainkan cukup jika ucapan yang sifatnya menghina

⁵⁸*Ibid.*, h. 407.

dapat didengar oleh umum atau tulisan yang bersifat menghina dapat dilihat oleh umum, sedangkan unsur objektif yang terakhir dalam Pasal 207 KUHP “suatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau suatu lembaga umum” merupakan badan atau lembaga pemerintahan yang resmi berdiri di Indonesia berdasarkan ketentuan UU, seperti: pengadilan, lembaga kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Jadi, di sini tidak termasuk pejabat yang bekerja dalam lembaga tersebut yang dihina, sebab jika pejabat yang dihina justru masuk sebagai penghinaan terhadap pegawai negeri atau minimal penghinaan terhadap pemerintahan. Lembaga yang menjadi objek terhina, direndahkan kehormatannya oleh si pelaku tindak pidana penghinaan yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Selain diatur dalam Pasal 207 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum. Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya masih ada pengaturan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum yang polanya berbeda dengan Pasal 207 KUHP. Pasal 208 KUHP menegaskan “barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau suatu gambar yang berisi penghinaan terhadap suatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau terhadap suatu lembaga umum yang terdapat di sana, dengan maksud agar isinya yang bersifat menghina itu diketahui oleh orang banyak atau menjadi diketahui oleh orang-orang yang lebih banyak lagi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.” Tindak pidana penghinaan kekuasaan umum yang

terdapat dalam Pasal 208 KUHP di atas, dapat dibagi dalam unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif: dengan maksud agar isinya yang bersifat menghina itu diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak;
- b. Unsur objektif: a. Menyebarluaskan, mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka; b. Suatu tulisan atau gambar; c. Yang berisi suatu penghinaan; d. Terhadap suatu kekuasaan umum yang diadakan di Indonesia atau suatu lembaga umum yang terdapat di sana.⁵⁹

5. Penghinaan terhadap golongan (suku, ras) dan agama

Dalam KUHP untuk penghinaan terhadap golongan diatur dalam dua ketentuan (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP). Sedangkan dalam penghinaan terhadap terhadap agama diatur dalam dua ketentuan (Pasal 156 a, Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) KUHP).

Pasal 156 KUHP menegaskan “barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Adapun yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya adalah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal-usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.” Selanjutnya, jika diuraikan unsur-unsur dari Pasal 156 KUHP maka dapat dibagi sebagai berikut :

⁵⁹*Ibid.*, h. 389.

- a. Di depan umum;
- b. Menyatakan atau memberi pernyataan;
- c. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan;
- d. Terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia.

Berdasarkan uraian unsur dari Pasal 156 KUHP di atas, untuk unsur di depan umum tidak akan dijelaskan lagi sebab sudah diuraikan pada bagian delik penghinaan sebelumnya, hanya selebihnya perlu diuraikan. Unsur menyatakan atau memberi pernyataan (uiting geven) diartikan sebagai perbuatan menunjukkan perasaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata maupun dengan melakukan tindakan.

Salah satu persoalan mendasar dari setiap ketentuan dalam penghinaan terhadap golongan, yakni setiap kali dicantumkan unsur perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan, ternyata tidak ada pendefensiannya yang dapat ditemukan dalam Undang-undang (KUHP). Semata-mata arti lebih lanjut dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan diserahkan sepenuhnya kepada para hakim untuk memberikan penafsiran dengan bebas saja. Selanjutnya, unsur keempat “terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia” diartikan sebagai pernyataan dari perasaan permusuhan, kebencian harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.” Terkait dengan apa yang dimaksud dengan golongan itu sendiri dalam Pasal 156 KUHP sudah memberikan penafsirannya secara otentik.

Beralih pada ketentuan selanjutnya, yang masih merupakan formulasi dari ketentuan tentang penghinaan terhadap golongan yakni ditegaskan dalam Pasal 157 KUHP. Pasal 157 KUHP menegaskan “barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau merendahkan diantara atau terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan enam bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.” Terhadap bunyi Pasal 157 KUHP terbagi dalam dua unsur meliputi :

- a. Unsur subjektif: dengan maksud agar isinya diketahui orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak;
- b. Unsur objektif: 1. Menyebarluaskan; 2. Mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka; 3. Di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan atau kebencian atau merendahkan; 4. Diantara atau terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia.

Kalau hendak dibandingkan antara Pasal 156 dan Pasal 157 yang pada dasarnya kedua-duanya merupakan delik penghinaan terhadap golongan sebagai delik umum. Perbedaannya terletak hanya pada pola penyampaian penghinaan terhadap golongan penduduk itu, baik satu atau beberapa golongan yang dilakukan melalui penyebaran, pertunjukan dan penempelan atas tulisan atau

gambar yang bermuatan permusuhan, kebencian atau merendahkan, sehingga pelakunya dikategorikan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 157 KUHP. Terakhir, delik penghinaan terhadap agama selanjutnya diegaskan dalam Pasal 156 a KUHP. Kendatipun diatur dalam Pasal 156 a saja, tetapi pada hakikatnya dalam ketentuan tersebut termuat dua tindakan penghinaan.

Pasal 156 a menegaskan “dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan :

- a. Pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud supaya orang agar tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar lebih jelasnya lagi, sehingga ketentuan tentang delik penghinaan terhadap agama di atas, tampak sifat pembedanya maka dapat dilihat melalui perbedaan unsur-unsurnya masing-masing.⁶⁰

Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 156 a ayat (1) KUHP terdiri sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja.
- b. Unsur objektif: a. Di depan umum; b. Mengeluarkan perasaan; c. Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Sedangkan pada tindak pidana yang selanjutnya terdapat dalam Pasal 156a ayat (2) KUHP unsur-unsurnya terdiri atas :

⁶⁰*Ibid.*, h. 407.

- a. Unsur subjektif: a. Dengan sengaja; Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha esa.
- b. Unsur objektif: a. Di depan umum; b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.⁶¹

Perbedaan prinsipil masing-masing dua bentuk penghinaan terhadap agama yang berada dalam satu ketentuan tersebut, tampak dari tujuan utama penghinaannya. Pada poin pertama semata-mata melakukan tindakan atau perbuatan yang cukup membuat agama tertentu terhina, karena adanya serangan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama, tapi tidak sampai orang yang memeluk suatu agama akan meninggalkan keyakinannya, hanya agama yang diyakini, dianggap ada perbuatan atau tindakan yang seolah-olah melakukan pelecehan terhadap apa yang diyakininya. Sedangkan pada poin kedua, serangan terhadap agama itu, bertujuan agar orang yang beragama hendak meninggalkan keyakinan atau agamanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁶¹*Ibid.*, h. 411.

BAB III

DELIK PENGHINAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Delik Penghinaan menurut Hukum Positif

1. Pengertian Delik Penghinaan

Asal muasal munculnya delik penghinaan merupakan perlindungan oleh negara terhadap reputasi atau kehormatan seseorang. Sehingga dalam pemenuhan hak untuk mendapat perlindungan atas kehormatan seseorang itu, sudah pasti akan memunculkan pula pelaku yang dianggap melakukan tindakan yang dapat menyebabkan reputasi atau kehormatan orang bersangkutan menjadi rendah.⁶²

Sulitnya menemukan titik kompromi dalam perlindungan hak atas kehormatan, antara yang menjadi objek (korban) dengan yang menjadi pelaku (penghinaan), yakni terhadap pelaku yang dianggap melakukan penghinaan atas kehormatan seseorang juga memiliki hak atas tindakannya. Hak tersebut adalah hak untuk menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi. Tetapi di sisi lain tindakan yang dimaksudkan sebagai kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berekspresi terdapat celah akan terjadinya perbuatan yang mengganggu reputasi atau hak atas kehormatan seseorang. Dalam perkembangan kemajuan teknologi, terutama pada akses informasi yang gampang diperoleh bagi setiap orang. Terjadi tindak pidana penghinaan sebagai perbuatan yang mengganggu hak atas

⁶²Andi Amzah, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 249.

kehormatan seseorang. Maka tindak pidana penghinaan tidak hanya terjadi dalam dunia rill, tetapi juga bisa terjadi dalam dunia maya (*cyber*).

Terhadap tindak pidana ini yang pada dasarnya memiliki wujud perbuatan yang sama, tetapi locus yang berbeda. Sebab satu terjadi di dunia rill, dan satunya juga bisa terjadi melalui dunia maya. Maka perkembangan tindak pidana penghinaan dalam dunia maya salah satu perbedaan mendasarnya yakni terlatak pada tempat (*locus*) atau medianya. Itulah sebabnya penting untuk mengemukakan letak perbedaan antara delik penghinaan yang terjadi melalui dunia real yang tunduk pada KUHP dengan tindak pidana penghinaan yang terjadi melalui dunia maya yang landasan yuridisnya di atur dalam Undang-undang ITE. Perbedaan ini selanjutnya akan dibagi dalam tiga poin, diantaranya : cara menggolongkan delik penghinaan, sanksi yang berlaku di dalam ketentuan a quo, dan makna tersiar di depan umum berdasarkan locus penghinaannya.

2. Unsur-unsur Delik Penghinaan

Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan lain. Huruf a : tindak pidana yang dimaksudkan di sini adalah semata-mata (pada pokoknya) ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara *objectief*, *zakelijk*, dan ilmiah mengenai sesuatu agama, yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan

bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Huruf b : orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada temanya, bahwa perbuatannya itu dipidanakan sepantasnya.⁶³

Tindak pidana pertama yang dalam pasal 156a KUHP tersebut terdiri atas sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur-unsur objektif :
 - 1) Di depan umum;
 - 2) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
 - 3) Yang bersifat penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.⁶⁴

Tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a KUHP tersebut terdiri atas :

- a. Unsur-unsur subjektif :
 - 1) Dengan sengaja;
 - 2) Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Mahaesa;
- b. Unsur-unsur objektif :
 - 1) Di depan umum;
 - 2) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan⁶⁵

Unsur sengaja oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan unsur-unsur yang lain dari tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a KUHP, maka kesengajaan pelaku juga harus ditujukan terhadap unsur-

⁶³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu diIndonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 151.

⁶⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1995), h. 411.

⁶⁵*Ibid.*

unsur yang lain dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 156a KUHP tersebut.

Unsur-unsur itu adalah :

- a. Di depan umum
- b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
- c. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan
- d. Terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia⁶⁶

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP ialah di depan umum. Adapun mengenai pengertian di muka umum adalah forum yang tidak terbatas. Misalnya ada pertemuan massal tetapi substansinya tidak dibicarakan terlebih dahulu, tidak ada batasan-batasan tertentu kemudian menyampaikan tanpa tanpa ada koridor-koridor yang disepakati terlebih dahulu. Pengertian di muka umum tersebut termasuk menulis di media massa, *facebook*, *tweeter*.

Unsur objektif kedua adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Unsur objektif ketiga adalah bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan. Tentang perasaan atau perbuatan mana, yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang ternyata tidak memberikan

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2011), h. 23

penjelasannya dan menyerahkan kepada para hakim untuk memberi penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Itu berarti bahwa di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan :

- a. Bahwa pelaku telah “menghendaki” mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
- b. Bahwa pelaku “mengetahui” perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum.
- c. Bahwa pelaku “mengetahui” perasaan yang ia keluarkan itu sifatnya bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan.
- d. Bahwa pelaku “mengetahui” perasaan bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan itu telah ditujukan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.⁶⁷

3. Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Simbol-simbol Agama

Sebuah norma hukum tidak akan berarti sama sekali apabila tidak ada sanksi yang mengikutinya. Karena itu hampir setiap ketentuan yang memuat rumusan pidana diakhiri dengan ancaman pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut S.R. Suanturi terdapat tiga cara dalam perumusan sanksi, yaitu :

- a. Dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal, atau juga pada ayat-ayat dari suatu pasal, yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu sanksi.
- b. Dalam beberapa undang-undang hukum pidana lainnya, pada pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada pasal tersebut.
- c. Sanksi dicantumkan pada pasal-pasal akhir⁶⁸

⁶⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus; Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 477

⁶⁸S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1997), h. 32

Pada umumnya perumusan norma dan sanksi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran sesat dalam UUPNPS dan KUHP di Indonesia menjadi satu kesatuan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa norma hukum tidak akan ada artinya apabila tidak ada sanksi yang mengaturnya. Ditinjau dari perumusan sanksi, baik KUHP Indonesia maupun dalam UUPNS, mencantumkan dalam pasal yang ayat yang bersangkutan. Pengaturan sanksi tindak pidana tersebut, sebagian dirumuskan pada awal rumusan pasal, dan sebagian dicantumkan di akhir rumusan tindak pidana. Sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran sesat adalah pidana penjara.

Pasal 156a berasal dari UUPNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dalam Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP. UUPNPS dengan tegas menyebutkan larangan mengusahkan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Larangan tersebut dimuat dalam Pasal 1, selengkapnya diikuti "setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahkan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan ke agama an yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".

Sedangkan ketentuan Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum” yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut dapat dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Argumen hukum dimasukkannya Pasal 156a ke dalam KUHP diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
- b. Munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran- aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.
- a. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.⁶⁹

⁶⁹Soeprapto, Hartono Hadi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 155

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam UUPNPS adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima Negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29 juga menyebutkan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan menodai Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan.

Ditinjau dari perumusan normanya, pasal 156a KUHP ditujukan pada pelanggaran tiga perbuatan, yaitu “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” agama, padahal penjelasan pasal 4 UUPNPS, yang akhirnya menjadi pasal 156a hanya mengikuti dan menyesuaikan redaksi pasal 154 dan 156 KUHP, yang lebih dikenal dengan pasal-pasal penyebaran kebencian. Terkait dengan penyisipan pasal 156a dalam KUHP ada beberapa permasalahan fundamental yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *rule of law* dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut mula-mula diterapkan bagi tindak pidana yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan dan merendahkan kepada golongan penduduk, yang selama ini bisa ditafsirkan dalam pengertian yang sangat luas. Begitu pula perkataann “perbuatan yang pada pokoknya”, yang juga tidak menentukan dengan pasti perbuatan yang dilarang. Pengertian “menyatakan perasaan permusuhan” dalam UUPNS dan pasal 156 KUHP sangat multitafsir, ketimbang pasal-pasal “penghinaan”. Pernyataan dalam bentuk penghinaan lebih jelas maksudnya dibandingkan dengan “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan

merendahkan”. Jadi, “penghinaan” atau “menghina” justru muncul sebagai istilah yang lebih jelas dan konkrit maksudnya.

Begitu juga, “permusuhan” dan “penyalahgunaan” juga maknanya lebih luas. Karena itu, kata “menghina”, “penghinaan” dalam hal ini sifatnya lebih konkrit dan pasti batasannya, bisa menggantikan “permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan” dalam UUPNPS dan pasal 156 KUHP.

Demikian pula perkataan “perbuatan yang pada pokoknya”, yang juga tidak menentukan dengan pasti perbuatan apa yang dilarang. Selanjutnya, istilah “penodaan” lebih konkrit artinya apabila dikaitkan dengan perusakan tempat-tempat ibadah atau benda-benda untuk beribadah. Penodaan adalah tindakan yang menyebabkan kotor pada objek, kalau diterapkan untuk agama sebagai sistem kepercayaan bersifat niskala, bisa menimbulkan multitafsir. Kata “penodaan” lebih tepat diterapkan pada perbuatan yang lebih konkrit, misalnya merusak atau menodai tempat ibadah atau benda untuk beribadah.

Berdasarkan UUPNPS pasal 4 terdapat 4 (empat) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu :

- a. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap suatu agama;
- b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- c. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- d. Perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa⁷⁰

⁷⁰Tim Sinar Grafika, *Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 32.

Dalam teori pidana dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan agar seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik pidana dikenal dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur subjektif meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷¹

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subjektif dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

⁷¹Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Cet. III, h. 193-194

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri hal-hal sebagai berikut :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari pelaku;
- c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pendapat yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Jonkers, bahwa kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.⁷² Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi penting agar seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana diberikan atau tidak diberikan sanksi sesuai dengan tindakan dan kompetensinya.

Dalam UUPNPS, rumusan sanksi pidana tercantum dalam pasal 3 “Apabia, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang

⁷²JE. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), h. 135

bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.⁷³

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review akan UUPNPS telah menjawab polemik mengenai kewenangan Negara atau Pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku penganut Agama yang melakukan perbuatan penyalahgunaan agama atau melakukan penodaan terhadap agama dapat ditempuh dengan menggunakan wewenangnyanya di bidang hukum administrasi dengan ancaman sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan melarang atau membubarkan kelompok atau organisasi yang dinilai telah menyalahgunakan agama atau menodai agama yang dianutnya. Selanjutnya, jika orang seseorang atau kelompok/organisasi tersebut tidak mengindahkan peringatan, Pemerintah tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan hukum dengan cara memprosesnya melalui perkara pidana (tindakan penyidikan dan penuntutan) ke pengadilan dan menuntut pidana berdasarkan UUPNPS dan pasal 156a.

Keberadaan UUPNPS serta pasal 156a KUHP yang memuat delik Agama yang telah diuji konstitusionalitasnya dapat menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk menegakkannya secara baik dan benar bagi para pelaku aliran sesat. Sanksi terhadap pelaku aliran sesat tergambar jelas dalam UUPNPS, pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal 3, adalah

⁷³ Ahmad Murtadho dan Masruchin Ruba' i Alfons Zakaria, *Op. Cit.*, h. 7.

tindakan lanjutan terhadap pelaku-pelaku yang tetap mengabaikan peringatan tersebut dalam pasal 2.

Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut, maka ancaman pidana lima tahun dirasa sudah wajar.

B. Delik Penghinaan menurut Hukum Islam

1. Pengertian Penghinaan Agama

Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk menghormati agama Islam, tidak menghina, atau menggugat sesuatu darinya. Karena itu, tidak seorangpun diperbolehkan menggugat agama ini atau merendahnya. Tidak boleh pula membicarakannya dengan perkataan yang mengandung unsur penghinaan, olok-olok atau ejekan. Setiap apa yang merupakan olok-olok atau cemoohan, maka itu merupakan kekufuran dan dapat mengkafirkan pelakunya. Setiap orang yang menyerukan sesuatu yang mengandung celaan terhadap salah satu aqidah Islam dari aqidah kaum muslim dan jika celaan tersebut dapat mengkafirkan pelakunya, maka ia akan dikenakan sanksi *riddah* atau murtad.⁷⁴

⁷⁴Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), Cet 2, h. 196

Riddah menurut bahasa adalah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut shara' adalah putusnya Islam dengan niat, ucapan, atau perbuatan. Berikut definisi *riddah* menurut para ulama fiqh :

a. Imam An-Nawawi

Riddah ialah memutus keislaman dengan dibarengi niat (ucapan) dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menentang, maupun meyakini (kekufuran tersebut). Adapun perbuatan yang berakibat pelakunya dianggap kafir adalah bermaksud menghina agama secara terang-terangan atau secara tegas menolak agama tersebut, seperti melemparkan mushaf Al-Qur'an ke tempat yang kotor dan sujud kepada berhala atau matahari.⁷⁵

b. Zainuddin Al-Malibari

Riddah adalah seorang mukallaf yang memutuskan keislamannya melalui perbuatan kufur, sedangkan dia melakukannya dalam keadaan tidak dipaksa lagi mengerti.⁷⁶

Riddah menurut bahasa adalah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut shara' adalah putusnya islam dengan niat, ucapan, atau perbuatan, misalnya sujud kepada berhala, baik sujud atas dasar menertawakan.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *riddah* adalah keluarnya seseorang dari islam

⁷⁵ Asy Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002), h. 306.

⁷⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Op. Cit.*, h. 149

menuju kekafiran dengan ucapan, perbuatan, maupun niat dan keyakinan yang di dalamnya terdapat kekufuran.

2. Jenis-jenis *riddah*

Jarimah *riddah* terbagi dalam 3 (tiga) jenis diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Dengan perbuatan atau menolak perbuatan

Keluar dari Islam dengan perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dengan menganggapnya boleh atau tidak haram, baik ia melakukannya dengan sengaja atau melecehkan Islam, menganggap ringan atau menunjukkan kesombongan. Contohnya seperti melecehkan urusan agama baik berupa perkara wajib atau perkara sunnah, atau mempermainkan atau menghinanya, atau melemparkan mushaf Al-Qur'an ke tempat kotor, atau menginjak-nginjaknya sebagai bentuk merendahkan dan penghinaannya padanya.⁷⁷

Adapun yang dimaksud dengan menolak melakukan perbuatan adalah keengganan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh agama (Islam), dengan diiringi keyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak wajib. Contohnya seperti enggan melaksanakan shalat, zakat, puasa, atau haji karena merasa semua itu tidak wajib.

⁷⁷ Muhammad bin Qosim al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*, (Achmad Sunarto), Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, 12), h. 171

b. Dengan ucapan (perkataan)

Keluar dari Islam juga bisa terjadi dengan keluarnya ucapan seseorang yang berisi kekafiran. Contohnya adalah seseorang berbicara dengan ucapan kufur, atau kesyirikan tanpa dipaksa, baik diucapkan dengan serius, bermain-main atau dengan bergurau. Jika ia berbicara dengan ucapak kufur, maka ia divonis keluar dari Islam, kecuali jika ia ucapkan hal itu dalam keadaan dipaksa.⁷⁸

c. Dengan i'tikad atau keyakinan.

Disamping itu, keluar dari Islam juga bisa terjadi dengan i'tikad atau keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Contohnya seperti seseorang yang meyakini langgengnya alam, atau keyakinan bahwa Allah itu makhluk, atau keyakinan bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Allah. Adapun keyakinan semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi murtad (kafir), sebelum diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.

Seperti dalam kaidah berikut Artinya: setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan (Islam) disertai dengan keyakinan halal melakukannya, maka ia telah keluar dari Islam. Kaidah ini mengandung arti bahwa orang yang melanggar larangan-larangan syariat Islam disertai dengan keyakinan bahwa hal tersebut tidak dilarang, maka ia telah keluar dari Islam. Penghalalan yang diharamkan, jika disertai alasan yang kuat (ta'wi>l) dan

⁷⁸Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), h. 895.

ketidaktahuan/kebodohan hukum yang sebenarnya, belum dapat dikualifikasikan telah keluar dari Islam. Ketidaktahuan/kebodohan itu bermacam-macam. Jika orang yang hidup di suatu negeri yang terisolir dari negeri-negeri kaum muslimin. Tidak ditemui di dalamnya kecuali orang-orang kafir. Maka orang seperti ini dimaklumi ketidaktahuannya. Adapun orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan hidup di negeri kaum muslimin, ia mendengar Qur'an, mendengarkan hadits-hadits dan ucapan para ulama, maka yang semacam ini tidaklah dapat dimaklumi akan ketidaktahuannya.

Unsur-unsur jarimah *riddah* itu ada dua macam, yaitu :⁷⁹

a. Kembali (keluar) dari Islam

Keluar dari Islam bisa terjadi dengan salah satu dari tiga cara, yaitu dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan seperti yang disebutkan jenis-jenis *riddah* di atas.

b. Adanya niat yang melawan hukum

Riddah disyaratkan bahwa pelaku perbuatan itu sengaja melakukan perbuatan atau ucapan yang menunjukkan kepada kekafiran, padahal ia tahu dan sadar bahwa perbuatan atau ucapannya itu berisi kekafiran. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan

⁷⁹Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 198

kekafiran, tetapi ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut menunjukkan kekafiran, maka ia tidak termasuk kafir atau murtad.

3. Sanksi Hukuman untuk Jarimah *Riddah*

Ada tiga macam, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.⁸⁰

a. Hukuman pokok

Hukuman pokok untuk jarimah riddah adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *hadd*. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW Oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah!*". (HR. Bukhori)⁸¹

Hukuman mati dalam kasus pemurtadan telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat mazhab Hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad sedangkan hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan itu dia tidak akan dihukum murtad.⁸²

Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik ia laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak dihukum mati karena murtad, melainkan dipaksa kembali kepada Islam, dengan jalan

⁸⁰Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*,... 28.

⁸¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2009), h. 323.

⁸²Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.

ditahan dan dikelarkansetiap hari untuk diminta bertaubat dan ditawarkan untuk kembali ke dalam Islam. Apabila ia menyatakan Islam maka ia dibebaskan. Akan tetapi apabila ia tidak mau menyatakan Islam maka ia tetap di tahan sampai ia mau menyatakan islam atau sampai ia meninggal. Disamping itu, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa anak mumayyiz yang murtad tidak dihukum mati dalam empat keadaan sebagai berikut :

- 1) Apabila islamnya mengikuti kedua orang tuanya, dan setelah baligh ia murtad. Dalam hal ini menurut qiyas, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut istihsan ia tidak dibunuh karena shubhah
- 2) Apabila ia murad pada masa kecilnya.
- 3) Apabila ia pada masa kecilnya Islam, kemudian setelah baligh ia murtad. Dalam hal ini ia tidak dibunuh, berdasarkan istihsan, karena ada shubhah.
- 4) Apabila ia berasal dari negeri bukan Islam, yang ditemukan di negeri Islam. Dalam hal ini ia dihukumi sebagai anak Islam, karena mengikuti negara (Islam), sama halnya dengan anak yang dilahirkan di lingkungan kaum muslimin.⁸³

Sebagai pengganti dari hukuman mati yang tidak diterapkan kepada anak mumayyiz dalam keempat keadaan tersebut, menurut Imam Abu Hanifah, ia dipaksa untuk menyatakan Islam, seperti halnya perempuan, dengan jalan ditahan atau dipenjara sebagai ta'zir.⁸⁴

Menurut ketentuan yang berlaku, orang yang murtad tidak dapat dikenakan hukuman mati, kecuali setelah ia diminta untuk bertaubat. Hukum meminta bertaubat itu wajib. Maksudnya, meminta orang yang murtad agar bertaubat dan kembali ke haribaan Islam sebelum dibunuh. Menurut mazhab

⁸³ Ahmad Wardi Muslih, *Op. Cit.*, h. 128

⁸⁴ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 473.

Syafi'i, barangsiapa murtad dari Islam, maka dia diminta sebanyak tiga kali untuk bertaubat.

Sedangkan menurut mazhab Maliki, kesempatan untuk bertaubat itu diberikan selama tiga hari tiga malam, terhitung sejak adanya putusan murtad dari pengadilan, bukan sejak adanya pernyataan kufur atau diajukannya perkara ke pengadilan. Syarat pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku murtad adalah tampaknya kekufuran pada orang yang murtad dan adanya pengakuan orang tersebut terhadap fakta ini serta sikapnya yang berkeras kepada dalam kekafiran. Selain itu, orang yang murtad itu sebelumnya adalah muslim, sudah baligh, dan tidak dipaksa.

b. Hukuman pengganti

Hukuman pengganti untuk jarimah riddah berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut :

- 1) Apabila hukuman pokok gugur karena taubat maka hakim menggantinya dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut. Dalam hal hukuman yang dijatuhkannya hukuman penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh pula tidak terbatas, sampai ia tobat dan perbuatan baiknya sudah kelihatan.
- 2) Apabila hukuman pokok gugur karena shubhah, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati dari pelaku wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu (wanita dan anak-anak) dipenjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama Islam.⁸⁵

⁸⁵M. Abbas Aula, *Murtad dalam Khazanah Yurisprudensi Islam*, Dirosah Islamiyah, No. 1, Vol. 1, 2003, h. 81.

c. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang murtad ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Penyitaan atau perampasan harta

Jika orang murtad meninggal sebelum kembali kepada Islam, hartanya dibagi lima. Seperlimanya untuk mereka yang berhak mendapatkan rampasan perang dan empat perlima diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Jika ahli waris orang murtad itu yang muslim berkata, “Ia telah masuk Islam sebelum meninggal” mereka dituntut untuk memberikan bukti. Jika mereka mampu memberikan bukti, hartanya diserahkan ahli waris mereka.

2) Berkurangnya kecakapan untuk melakukan tasarruf Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk mentasarrufkan hartanya, baik harta tersebut diperoleh sebelum murtad maupun sesudahnya.

4. Unsur-unsur dalam Penghinaan terhadap Simbol Agama

Menentukan sesat atau tidaknya sebuah aliran paham keagamaan harus dilakukan dengan hati-hati selain mendasarkan diri pada dalil-dalil keagamaan (*an-nushus as-syar'iyah*), juga perlu meneliti latar belakang hingga muncul pemahaman yang menyimpang tersebut. Suatu paham dikatakan sesat jika

bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum syariah yang qath'i suatu paham yang menyimpang dari rukun Islam, rukun iman, dan atau tidak mengimani kandungan al-Qur'an dan as-Sunnah dapat dikategorikan sesat atau melecehkan suatu agama. Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) tahun 2007 yang lalu menetapkan kriteria sebuah aliran keagamaan dianggap sesat diantaranya adalah :

- a. Mengingkari dari salah satu rukun Islam yang lima (5) dan rukun Iman yang enam (6);
- b. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan as-Sunnah);
- c. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an;
- d. Mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Qur'an;
- e. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
- f. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam;
- g. Menghina, melecehkan atau merendahkan para Nabi dan Rasul;
- h. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir;
- i. Merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti shalat fardhu tidak lima waktu dan pergi haji tidak ke Baitullah
- j. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yaitu al Qur'an dan Sunnah.⁸⁶

Kriteria tersebut apabila dilanggar satu poin saja maka sudah dianggap sesat atau setelah melakukan penistaan terhadap agama, apalagi kalau yang dilanggar beberapa atau keseluruhan point-point dalam kriteria tersebut.

⁸⁶Ma'ruf Amin, *Kebijakan Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat*, (Jakarta: Mimbar Ulama, No. 341, Rabi'ul Awal 1429/Maret 2008), h. 19

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Tinjauan Yuridis terhadap Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama dalam Pasal 156a

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila yang menempatkan agama sebagai peranan penting, serta menjadi sasaran dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, serta menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penegasan tersebut pada suatu pihak membuktikan bahwa Indonesia bukan negara yang netral agama, tetapi pada pihak lain bertitik tolak dari kebhinekaan masyarakat Indonesia, khususnya kemajemukan dalam agama dan kepercayaan, maka negara Indonesia juga tidak didirikan diatas dasar salah satu agama. Oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau Pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah di dasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasikan hukum Tuhan.⁸⁷

⁸⁷ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1982), h. 1

Masalah agama dan kehidupan beragama di Indonesia merupakan sesuatu yang sensitif. Perbedaan penafsiran suatu ajaran agama dapat menimbulkan pertikaian atau konflik antar kelompok umat beragama. Misalnya masalah perbedaan madzhab dalam agama Islam pun dapat menimbulkan perpecahan antar umat, padahal masing-masing memiliki landasan hukum yang jelas. Apalagi perbedaan yang bersandar pada penafsiran yang sewenang-wenang yang hanya bersandar pada logika. Undang-undang pencegahan penghinaan agama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan keharmonisan hubungan antar dan intra umat beragama. Undang-undang pencegahan penghinaan agama bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan atau penghinaan agama. Pernyataan ini disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Djamil, MA, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/12/2012). Sidang Nomor 84/PUU-X/2012 dengan pokok perkara pengujian Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penghinaan Agama.⁸⁸

Sebelum “pasal amandemen” ini tidak dikenal tindak pidana terhadap agama (*offences against religion*), meskipun ada beberapa pasal dalam KUHP yang termasuk dalam kategori delik yang berkaitan dengan agama (*offences related*

⁸⁸<http://undang-undang-indonesia.com>, diakses September 2017.

religion). Sejak konsep RUU KUHP 1993 hingga yang terbaru RUU KUHP 2010, kedua jenis tindak pidana itu dikenal sebagai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama.⁸⁹

Berdasarkan kedua kategori di atas, maka dalam KUHP yang sekarang berlaku, tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol agama diatur dalam Pasal 156a dan tindak pidana terhadap kehidupan beragama yang tersebar dalam Pasal 175-177, dan Pasal 503 ke-2 KUHP. Perlu dijelaskan bahwa pasal 156a tidak berasal dari *wetboek van strafrecht* (WvS) Belanda, melainkan dari UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penghinaan Agama. Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.

Jika pasal 156 masih bersifat umum, maka pasal 156a melalui UU. PNPS. Nomor 1 tahun 1965 ini telah bersifat lebih khusus terutama mengenai penghinaan terhadap simbol-simbol agama. Walaupun telah bersifat lebih khusus, namun pasal 156a ini hanya berkaitan dengan keyakinan keagamaan belum mengenai hal-hal penting yang harus dilindungi oleh negara.⁹⁰

Disamping itu apabila dilihat dari penempatan pasal 156a dalam bab V buku II tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, yang membawa konsekwensi bahwa harus lebih dahulu melindungi ketertiban umum daripada melindungi penghinaan terhadap simbol-simbol agama, yang menimbulkan ketertiban umum. Pada pasal

⁸⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 323

⁹⁰Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1981), h.71

156a ini sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penghinaan simbol-simbol agama. Dari segi sanksi hukum bagi pelaku penghinaan simbol-simbol agama akan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara sesuai pasal 156a, pasal ini selengkapnya berbunyi “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apaun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana terhadap kepentingan agama adalah hanya jenis pidana pokok yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Di sini tidak ditetapkan adanya pidana tambahan. Pidana penjara ditentukan dalam waktu tertentu yakni lima tahun, empat tahun, dua tahun enam bulan, satu tahun empat bulan, sembilan bulan, empat bulan, empat bulan dua minggu, dan tiga hari. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman sanksi pidana maksimum yang paling tinggi adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yakni lima tahun, dan yang paling rendah adalah satu bulan dua minggu, pidana kurungan hanya dikenal satu selama satu hari. Adapun pidana denda ditetapkan dalam jumlah Rp. 4500,-Rp. 1800,-Rp. 225,-. Jadi di sini pidana denda maksimum yang diancamkan paling tinggi sebesar Rp. 4500,-dan paling rendah Rp. 225,-.⁹¹

Sebelum dijatuhkan hukuman, juga memberikan kesempatan untuk menghentikan perbuatannya sebagaimana dalam pasal 1 Penetapan Presiden tentang

⁹¹Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Op. Cit.*, h. 63

pencegahan penyalahgunaan dan penghinaan agama. Jika peringatan untuk menghentikan perbuatannya itu tidak dipatuhi, maka akan dijatuhkan sanksi. Peringatan ini diatur dalam pasal 2 dalam penetapan Presiden tersebut, jadi sebelum dijatuhkan sanksi hukum memberikan tenggang waktu agar pelaku dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulang kesalahannya. Jika peringatan itu diabaikan maka akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun pengertian unsur “barang siapa” itu dapat diartikan lain dan pada orang, tetapi orang tersebut adalah harus mampu bertanggung jawab dalam arti keadaan jiwa orang atau perbuatan harus normal. Menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat orang itu mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu :

1. Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang dilakukannya.
2. Mampu untuk menyadari, bahwa tindakan itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.⁹²

Pengertian unsur “dengan sengaja di muka umum ”dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan suatu penafsiran resmi atau interpretasi otentik namun demikian dalam praktek peradilan dan doktrin kesengajaan adalah meliputi pengertian sebagai berikut :

1. Sengaja dengan maksud (*ogmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dan maksud atau tujuan dan

⁹²Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang; Universitas Muhammadiyah, 2008), h. 205.

- pengetahuan dan pelaku artinya pelaku benar-benar menghendaki peristiwa itu terjadi.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bijzakerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*). Di sini yang menjadi kesadaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Pelaku dalam hal ini dipandang telah melakukan tindakan kesengajaan apabila dari perbuatannya itu menimbulkan akibat tertentu yang sebelumnya dapat diperkirakan dengan pasti akan terjadi.
 3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolu eventualis*). Di sini pelaku dianggap melakukan perbuatan atau akibat tertentu apabila dan perbuatannya tersebut dapat diperkirakan kemungkinan akibat yang akan ditimbulkannya.⁹³

Melihat perumusan pasal 156a sebetulnya ingin memidana mereka yang (di muka umum) mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan) yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, hal ini memungkinkan pembedaan secara langsung pernyataan perasaan tersebut yang ditujukan terhadap agama. Jadi konsekwensinya menyangkut pembedaan perbuatan tersebut tanpa dihubungkan dengan persoalan apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu ketenteraman orang beragama dan karena itu membahayakan ketertiban umum.⁹⁴

Benih-benih delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama juga dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahkan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi "setiap orang dilarang

⁹³E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 172.

⁹⁴Supanto, *Delik Agama*, (Surakarta: UNS Press, 2007), h. 103

dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.

Sehubungan dengan pasal 156 KUHP tidak dapat dilepaskan dengan pasal 154 yang juga terletak dalam kejahatan terhadap ketertiban umum, pasal tersebut dikategorikan sebagai *haatzaai artikelen*, sebagai pasal karet. Menurut sejarahnya, pasal ini digunakan untuk kepentingan pemerintah Kolonial Belanda, dan pernah dimanfaatkan untuk mematahkan kaum pergerakan nasional, seperti Bung Karno dan kawan-kawannya.⁹⁵

Menurut penulis, pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam dari pada melindungi warga negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol agama. Dalam pratiknya pasal ini seperti “pasal karet” (*hatzaai articelen*) yang bisa ditarik-ulur, mulur-mungkret untuk menjerat siapa saja yang dianggap menghina agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik, wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengan mainstream, aliran sempalan, dan sebagainya. Karena kelenturannya itu, “pasal karet” bisa direntangkan hampir tanpa batas.

⁹⁵E.Y. kanter dan S.R. Sianturi , *Op. Cit*, h.102.

Jika dicermati dengan seksama baik pasal 156 KUHP maupun pasal 156a KUHP memiliki kelemahan-kelemahan, sebagai berikut :

1. Dalam pasal 156 KUHP, kita tidak menemukan rumusan yang jelas tentang delik agama. Pasal ini hanya menyinggung sedikit tentang delik agama, tapi tidak jelas apakah yang dilindungi oleh pasal ini “orang” atau “agama”.
2. Pasal 156 KUHP ini, perlu diperjelas mengenai maksudnya. Pasal ini ditinjau dari sudut ajaran Islam merupakan pasal yang menyangkut delik penghinaan. Hanya saja di dalam ajaran Islam “penghinaan itu tidak disyaratkan dilakukan di muka umum”. Tidak pula disyaratkan perbuatan itu mengganggu ketertiban umum.
3. Pasal 156a KUHP yang dituangkan di dalam UU PNPS Nomor 1 tahun 1965, menghendaki adanya delik agama, secara umum; perlindungan terhadap agama-gama yang diakui sebagai agama yang syah di Indonesia. Namun kalimat “di muka umum” yang membawa konsekwensi seperti pasal 156.⁹⁶

Jadi lebih dominan kepentingan umum daripada kepentingan agama. Jika dalam KUHP yang selama ini berlaku penghinaan terhadap simbol-simbol agama hanya ada dalam satu pasal (156a), dalam RUU KUHP yang merevisi KUHP lama, pasal penghinaan agama diletakkan dalam bab tersendiri, yaitu bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Keagamaan yang didalamnya ada 8 (delapan) pasal.

Dari delapan pasal itu dibagi dalam dua bagian yaitu Bagian I mengatur tentang tindak pidana terhadap agama. Bagian ini mengatur tentang penghinaan terhadap agama (pasal 341-344) dan penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama (pasal 345). Bagian II mengatur tentang tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan (pasal 346-347); dan perusakan tempat ibadah (pasal 348). Pada intinya frasa penyalahgunaan dalam pasal

⁹⁶*Ibid.*, h. 111

156a memuat kejahatan yang harus dipidana, karena semua yang berguna baik artinya, tetapi jika sudah disalah gunakan menjadi jahat dan berbahaya. Penyalahgunaan agama dapat dibuktikan dengan agama itu sendiri, dimana agama yang bersangkutan akan membuktikan apakah sesuatu perbuatan termasuk menyimpang, tidak sesuai, atau tidak. Agama dapat membuktikan apakah suatu perbuatan yang tidak sesuai itu menjadi penyalahgunaan atau tidak.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah jarimah atau jinayah. Pakar fiqh telah mendefinisikan jarimah yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman had atau ta'zir, sedangkan jinayah yaitu hasil perbuatan seseorang yang dibataskan pada perbuatan yang dilarang oleh syara" yang merugikan jiwa dan harta dll.

Larangan-larangan hukum artinya melakukan perbuatan hukum yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Hukum dalam sistem hukum apapun bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali hukum islam. Tujuan hukum Islam sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman ulama saat itu atas dasar nash yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits untuk mengatur

kehidupan manusia.⁹⁷ Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan hukum Islam dalam menangani kasus aliran sesat dan penghinaan agama. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam *Ilmu Ushul al-Fiqh*-nya menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari *hifdzal-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzal-'aql* (menjaga akal), *hifdzal-din* (menjaga Agama), *hifdzal-mal* (menjaga harta) dan *hifdzal-nasl* (menjagaketurunan).⁹⁸

Dalam fiqh jiyasah, al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang dijadikan dasar pijakan terhadap segala hal yang dihadapi oleh umat Islam. Sedangkan hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, hadits berfungsi sebagai penjelas, mengurai pandangan atau konsep al-Qur'an dan sebagai praktek amaliah dari al-Qur'an. Di samping al-Qur'an dan hadits, ada juga sumber lain yaitu ijma' dan qiyas, kedua sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam.⁹⁹

Permasalahan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol agama, secara otomatis menyeret agama itu sendiri untuk turut serta menyelesaikannya. Ketika negara menjadi pelindung agama Islam, maka konsekwensinya adalah setiap ancaman terhadap negara adalah juga dianggap sebagai ancaman terhadap agama. Ini merupakan perlawanan Islam bagi pelaku tindak pidana

⁹⁷Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.

⁹⁸Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da'wah Islamiyah al-Azhar, tt), h. 200

⁹⁹Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syariat Islam*, (terj, Muhammad Zaki, dkk), h. 53.

penghinaan terhadap simbol-simbol agama sebagai sesuatu yang dapat diberi sanksi.

Hal tersebut berdasarkan Al Qur'an surat At-Taubah ayat 12 yaitu :

وَأِنْ تَكُونُوا أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتَلُوا أَيْمَةً الْكَفَرِ إِنَّهُمْ لَا
أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٢

Artinya : “Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, Karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. (Qs. At- Taubah : 12)¹⁰⁰

Dalam rangka melindungi keutuhan serta kereligiusan agama yang bersangkutan dengan tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol agama dan kehidupan beragama, sudah terendus sejak lama. Di antara kriteria yang sangat menonjol adalah pengakuan menjadi Nabi, menerima wahyu, dan kedatangan Malaikat Jibril. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pernah terdapat seorang yang mengaku Nabi dihukum bunuh. Musailamatul Kazzab dan al-Aswad al-Insi dihukum bunuh karena keyakinan sesat, mereka mengaku sebagai Nabi. Di dalam al-Qur'an larangan menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 57 yaitu :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا مُهِينًا ٥٧

¹⁰⁰Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005), h. 298

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan”. (QS. al-Ahzab : 57).¹⁰¹

Dengan demikian, maka pelanggaran bagi tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol agama dapat dikenakan hukuman. Dalam hukum Islam sering disebut dengan jarimah, yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukuman had maupun ta'zir. Hadd sendiri merupakan sanksi hukum yang sudah jelas tertera dalam nash al-Qur'an maupun hadits. Sedangkan ta'zir ialah sanksi hukum yang tidak dijelaskan dalam nash al-Qur'an maupun hadits, hanya dibebankan pada kearifan seorang hakim.

Jarimah ta'zir dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu, jarimah ta'zir adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum. Jarimah ta'zir secara rinci dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan,
2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan,
3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak,
4. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta,
5. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu,
6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

¹⁰¹*Ibid.*, h. 489.

Apabila ditinjau dari sasaran hukum yang diterapkan, hukuman ta'zir ini dapat diperinci menjadi beberapa bagian, diantaranya :¹⁰²

1. Hukuman mati

Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang.

2. Hukuman cambuk

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk atau tongkat. Hukuman penjara menurut syara' bukanlah memenjarakan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum.

3. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman hadd, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir.

4. Merampas harta

Merampas harta dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya

¹⁰²Ahmad Wardi Muslih, *Op. Cit.*, h. 267.

menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

5. Hukuman denda

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi oleh pelaku.

Mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang tidak ditemukan kriterianya dalam al-Qur'an maupun hadits, pelaku tersebut dapat dijerat dengan hukuman ta'zir. Sanksi hukum ini dirasa pantas dan wajar diganjar terhadap pelaku penghinaan terhadap simbol-simbol agama. Karena hakim akan menimbang segala perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan oleh pelaku, untuk memutuskan sanksi hukum apa yang akan dijatuhkan pada mereka, yang tentunya sesuai dengan tujuan adanya sanksi hukum.

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Sebagai prinsip keadilan dapat disebut asas hukum Islam. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berbuat adil dan menegakkan keadilan sebagaimana firman Allah dalam surah Shaad ayat 26 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya : “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”. (QS. Shaad : 26).

Sanksi pidana bagi pelaku penghinaan terhadap simbol-simbol agama yaitu lima tahun penjara sebagaimana tertera pada UUPNPS, dalam satu sisi dinilai sejalan dengan dengan hukuman ta'zir yang adalah dalam fiqh jinayah. Hal ini apabila delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang dilakukan dinilai ringan. Di sisi lain, sanksi hukum bagi pelaku penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam UUPNS akan sangat bertolak belakang dengan fiqh jinayah, apabila delik penghinaan agamanya dinilai berat. Meruntut sejarah yang ada, ta'zir yang dikenakan bagi pelaku aliran sesat terberat adalah hukuman dibunuh. Dalam keterangan kitab *Ash-Syifa Bi Ta'rif Huquq Al-Musthafa* karangan Syaikh Qadhiyadh yang mengatakan bahwa *“Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa orang yang mencela Allah Ta’ala dikalangan kaum muslimin, maka dia kafir, halal darahnya.”*¹⁰³

Sedangkan dalam UUPNPS, apakah besar maupun kecil delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama, sanksi hukumnya hanya selama-lamanya pidana penjara lima tahun. Di dalam hukum pidana positif juga terdapat dalam hukum pidana Islam pada pembahasan tentang penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang sama halnya dengan penghinaan terhadap agama, karena arti penghinaan adalah

¹⁰³Qadhiyadh, *Ash-Syifa bi Ta'rif Huquq Musthafa*, juz 2, h. 577.

celaan, penistaan, atau penghinaan.¹⁰⁴ Penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam hukum Islam disebut dengan *sab'addin*. Penghinaan terhadap simbol-simbol agama Islam adalah mencela atau menghina al-Qur'an dan hadits, menghina masjid, ulama/kyai dan lainnya.

Ditinjau dari segi dasar hukum positif yang berdasarkan KUHP pada pasal 156a yang biasa disebut dengan pasal penghinaan agama. Pasal 156a KUHP ini telah menyebutkan adanya unsur kejahatan, yaitu unsur penyalahgunaan agama. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya semua hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, makak hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.¹⁰⁵

Pada intinya dalam pasal 156a memuat kejahatan penghinaan terhadap simbol-simbol agama harus dipidana, dan negara harus berusaha untuk melindungi agama-agama yang berkembang di Indonesia dari organisasi-organisasi atau aliran-aliran yang menyalahgunakan atau mempergunakan agama sebagai tameng bagi hidupnya organisasi atau aliran yang mempunyai tujuan melanggar hukum, memecah persatuan atau menodai agama.

Membandingkan kedua hukum di atas tentu jelas lebih kuat dan akurat dasar hukum pada Islam, sebab hukum pidana Islam berasal dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Berbeda dengan hukum pidana yang hanya hukum olahan manusia, namun

¹⁰⁴Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 802.

¹⁰⁵Ahmad Murtadho, Masruchin Ruba" i, Alfons Zakaria, *Op. Cit.*, h.10

karena hukum pidana Islam belum bisa diterapkan di Indonesia, maka sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mematuhi hukum yang diterapkan oleh negara walaupun sebenarnya di Indonesia sebagian besar warga negaranya adalah beragama Islam.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam tataran ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan pasal 156a (KUHP) tentang delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama, perumusan delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penodaan agama, karena penghinaan disini mengandung sifat melecehkan, meremehkan dari suatu agama melihat kriteria mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa sanksi hukumnya adalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Pandangan hukum Islam mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dapat ditemukan dalam nash al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman ta'zir yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman ta'zir disisi lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam pasal 156a KUHP, hal ini bila delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang dilakukan dinilai ringan, tetapi di sisi lain akan sangat

bertolak belakang, apabila delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya penanggulangan delik agama hendaknya memperhatikan karakteristik delik agama sebagai kejahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang sangat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah diatur secara rinci dalam ketentuan hukum pidana nasional.
2. Upaya penanggulangan delik terhadap agama ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan agar semua dapat merasakan ada perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da" wah Islamiyah al-Azhar, tt)
- Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim (Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim)*, (Solo: Insan Kamil, 2008)
- Andi Amzah, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Armansyah, *Jejak Nabi Palsu*, (Bandung: Mizan Publika, 2007).
- Asy Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. 8.
- Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jakarta, Media Sarana Press, 2007).
- Dedi Ismatullah, *Hukum Tata Negara*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009).
- Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Eddy OS. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014).
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002).

- Hartono Ahmad Jaiz, *Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesat Umat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009).
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- JE. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997).
- Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), cet. Kedua.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1982).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), cetakan ketiga.
- Kementerian Agama RI, *Penistään Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2011).
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. Ke V.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Cet. III.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- M. Abbas Aula, *Murtad dalam Khazanah Yurisprudensi Islam*, Dirosah Islamiyah, No. 1, Vol. 1, 2003.
- Ma'ruf Amin, *Kebijakan Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat*, (Jakarta: Mimbar Ulama, No. 341, Rabi'ul Awal 1429/Maret 2008).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990).
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara. 1998).

- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), cetakan ke-6.
- Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta: bumi Aksara, Cet V, 2004).
- Muhammad bin Qosim al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*, (Achmad Sunarto), Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, 12).
- Muhammad Faruq Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Qolam, 1981).
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009).
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1981).
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus; Kejahatan Terhadap Kepentingan HukumNegara*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- _____, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum dan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- _____, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1995)
- Republika.online, *Akhir Perjalanan Kasus Ahok*, <https://news.detik.com>, diakses September 2017.
- S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), edisi revisi ketiga.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1997).
- Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004).
- Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: JB Wolters, 1995).

Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), Cet 2.

Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Bandung: Pioner Jaya, 1992).

Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Soeprapto, Hartono Hadi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), cet ketujuh.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), cet. ke-v.

Tim Sinar Grafika, *Undang-undang Dasar Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1995).

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang; Universitas Muhammadiyah, 2008).

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu diIndonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 2005), edisi revisi keempat.

Wiryono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Erasco, 1999).

Yusuf al-Qardowi, *Membumikan Syariat Islam*, (terj, Muhammad Zaki, dkk).

Zaenal Abidin, (et. all.), *Hukum Pidana*, (Jakarta: Prapatanja, 2002) cet, ketiga.